



#2023
#KHP THRIVE



PUSAT RISET PERIKANAN
BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan “**Laporan Kinerja Pusat Riset Perikanan Tahun 2023**” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Laporan Kinerja Pusat Riset Perikanan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik *makro* maupun *mikro* serta langkah-langkah perumusan kebijakan kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.


Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan perumusan kebijakan kelautan dan perikanan dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan penelitian secara inovatif di masa yang akan datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan.

Jakarta, **19** Januari 2024

Kepala Pusat Riset Perikanan




Yayan Hikmayani, S.Pi., M.Si.
NIP. 19671004 199903 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
PENDAHULUAN	2
Latar Belakang	2
Tujuan	3
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	4
Keragaan Pegawai.....	8
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2023.....	11
Potensi dan Permasalahan	13
PERENCANAAN KINERJA	16
Rencana Strategis	16
Rencana Kerja Tahun 2023.....	23
Perjanjian Kinerja Tahun 2023	26
Pengukuran Kinerja.....	28
AKUNTABILITAS KINERJA	33
Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023	33
Evaluasi dan Analisis Kinerja	34
Akuntabilitas Keuangan TA 2023	76
Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	81
PENUTUP.....	86
Kesimpulan.....	86

Permasalahan dan Tindaklanjuti	87
Penutup	89
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keterkaitan visi, misi dan tujuan dalam Renstra BRSDM KP.....	18
Tabel 2 Rencana Kerja Pusriskan TA 2023	23
Tabel 3 Penjelasan Revisi Perjanjian Kinerja Pusat Riset Perikanan	24
Tabel 4 Anggaran unit kerja dilingkup Pusat Riset Perikanan	25
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Pusriskan TA 2023	27
Tabel 6 Bobot validasi IKK	28
Tabel 7 Klasifikasi target indikator kinerja	30
Tabel 8 Status Capaian Nilai Kinerja	31
Tabel 9 Capaian IKK Pusat Riset Perikanan TA 2023	35
Tabel 10 Capaian IKK 1–Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Miliar).....	37
Tabel 11 Perbandingan IKK Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Miliar) dengan Eselon II Lainnya.....	37
Tabel 12 Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lingkup Pusriskan.....	39
Tabel 13 Capaian IKK 2–Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK–RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%)	40
Tabel 14 Perbandingan capaian Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK–RI atas LK Pusat Riset Perikanan Eselon II lainnya	41
Tabel 15 Capaian IKK 3–Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)	43
Tabel 16 Rincian Nilai IP ASN Pusat Riset Perikanan Tahun 2023	43
Tabel 17 Perbandingan Nilai IP ASN Pusat Riset Perikanan Tahun 2023 dengan Eselon II Lainnya	44
Tabel 18 Capaian IKK 4–Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai).....	46
Tabel 19 Perbandingan IKK Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai) dengan Eselon II Lainnya.....	47
Tabel 20 Capaian IKK 5–Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai).....	49
Tabel 21 Rincian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Puriskan Tahun 2023	49
Tabel 22 Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Puriskan Tahun 2023 dengan Eselon II Lainnya	50

Tabel 23	Capaian IKK6–Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%).....	53
Tabel 24	Perhitungan Penerapan Manajemen Pengetahuan Pusat Riset Perikanan Tahun 2023	54
Tabel 25	Perbandingan IKK Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) dengan Eselon II Lainnya.....	54
Tabel 26	Capaian IKK 7–Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%)	56
Tabel 27	Data Rekapitulasi persentase rekomendasi hasil pengawasan Pusrisikan.....	57
Tabel 28	Perbandingan IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya	58
Tabel 29	Capaian IKK 8–Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	60
Tabel 30	Rincian nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pusrisikan Tahun 2023	61
Tabel 31	Perbandingan IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai) dengan Eselon II Lainnya	62
Tabel 32	Capaian IKK 9–Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai).....	63
Tabel 33	Rincian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan	64
Tabel 34	Perbandingan IKK Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai) dengan Eselon II Lainnya.....	65
Tabel 35	Capaian IKK 10–Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)	67
Tabel 36	Perbandingan IKK Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan) dengan Eselon II Lainnya.....	68
Tabel 37	Capaian IKK11–Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%).....	70
Tabel 38	Rincian Dokumen Manajemen Internal Pusat Riset Perikanan.....	70
Tabel 39	Perbandingan IKK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya.....	71
Tabel 40	Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Lingkup Pusrisikan (%)	77

Tabel 41 Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Utama dan Pendukung IK Tahun 2023.....	79
Tabel 42 Kronologi Revisi Anggaran Pusat Riset Perikanan Tahun 2023...	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Pie Jumlah Pegawai Lingkup Pusrisikan.....	8
Gambar 2 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Lingkup Pusriskan.....	9
Gambar 3 Diagram Sebaran PNS menurut Tingkat Pendidikan.....	10
Gambar 4 Diagram Sebaran PNS Lingkup Pusriskan dalam rentang umur ..	11
Gambar 5 Diagram perbandingan gender pegawai lingkup Pusriskan	11
Gambar 6 Nilai NPSS Pusat Riset Perikanan Aplikasi Kinerja Tahun 2023	34
Gambar 7 Perbandingan Persentase Capaian PNBPN Tahun 2023 dengan Eselon II Lainnya	38
Gambar 8 Perbandingan Persentase Capaian Indeks Profesionalitas ASN unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023	44
Gambar 9 Perbandingan Capaian Penilaian Mandiri SAKIP unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023.....	47
Gambar 10 Perbandingan Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023.....	50
Gambar 11 Perbandingan Capaian Penerapan Manajemen Pengetahuan unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023	55
Gambar 12 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%)	58
Gambar 13 Perbandingan capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023	62
Gambar 14 Perbandingan capaian nilai kinerja anggaran unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023.....	65
Gambar 15 Perbandingan Capaian Kemitraan Tahun 2023 dengan Eselon II Lainnya.....	68
Gambar 16 Perbandingan Capaian Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Tahun 2023 dengan Eselon II Lainnya.....	71
Gambar 17 Sertifikat Penghargaan Lingkup Pusriskan 2023.....	76
Gambar 18 Nilai SMART (Nilai Kinerja Anggaran) Pusriskan.....	81

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) merupakan unit Es.2 yang memiliki fungsi penyusunan kebijakan teknis rencana dan program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan. Pusriskan dalam upaya untuk meningkatkan pencapaian pembangunan perikanan melalui peningkatan akuntabilitas kinerjanya. sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, pada akhirnya diterapkan pada sasaran strategis dalam Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021-2024 yang ditetapkan melalui ketentuan pada Nomor 180/PER-BRSDM/2021 tentang Rencana Strategis Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021-2024 Sebagai Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/PER-BRSDM/2020 Tentang Rencana Strategis Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021-2024, yang diikuti dengan membuat Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja Tahunan secara konsisten, terus menerus, dan berkesinambungan.

Pusriskan telah menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam Tahun 2023. Satu sasaran kegiatan tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan (IKK). Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari dua sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2023 ini tercapai dengan baik dalam pencapaian progres kegiatan. Hasil Pengukuran capaian kinerja Pusriskan dengan menggunakan aplikasi

kinerjaku.kkp.go.id Tahun 2023 menunjukkan capaian Pusrisikan berwarna Biru atau Istimewa dengan nilai **111,38%**.

Pengukuran tersebut diperoleh dari hasil capaian Pusrisikan selama Tahun 2023, dengan terukurnya indikator kinerja Pusrisikan sebagai berikut :

1. Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Riset tercapai sebanyak 3,402 Miliar Rupiah atau 120,00% dari target 1,725 Miliar Rupiah;
2. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan tercapai sebesar 0% atau 120,00% dari target $\leq 0,5$;
3. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan tercapai senilai 90,77 atau 116,37% dari target 78;
4. Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan tercapai senilai 80,90 atau 106,45 dari target 76;
5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan tercapai senilai 97,33 atau 104,66% dari target 93;
6. Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tercapai sebesar 116,58% atau 120,00% dari target 92%;
7. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan tercapai sebesar 100,00% atau 120,00% dari target 80%;
8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan tercapai senilai 90,98 atau 97,05% dari target 93,75;
9. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan tercapai senilai 85,96 atau 104,83% dari target 82;
10. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusat Riset Perikanan tercapai sebanyak 33 mitra atau 120,00% dari target 30 mitra;
11. Presentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya Pusat Riset Perikanan tercapai sebesar 100,00% atau 100,00% dari target 100,00%.

Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Pusrisikan TA 2023 cukup baik yaitu mencapai Rp.122.160.956.481 atau 98,74% dari alokasi anggaran sebesar Rp.123.717.469.000. Bila realisasi tersebut dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Pusrisikan yang mencapai 111,38% maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Pusrisikan cukup efisien dengan nilai efisiensi sebesar 12,64.

Capaian indikator kinerja Pusrisikan sudah terbilang baik, namun dalam proses pencapaian kinerjanya ada beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut mempengaruhi ketercapaian kinerja sehingga perlu dilakukan tindaklanjut rekomendasi agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Terdapat 2 (dua) permasalahan dan tindaklanjut kedepannya yang diperoleh pada Tahun 2023 ini yaitu

1. Tidak tercapainya target IKK Nilai IKPA Satker Pusat Riset Perikanan, dengan target sebesar 93,75 realisasinya hanya sebesar 90,98. Hal ini disebabkan terdapat dua indikator IKPA yang mendapatkan nilai rendah, yaitu Deviasi Hal. III DIPA (nilai 70,21) dan Penyerapan Anggaran (nilai 77,03). Selain itu, dua indikator IKPA yang lain juga belum mendapat nilai maksimal, yaitu Belanja Kontraktual (nilai 91) dan Pengelolaan UP & TUP (nilai 94,05).
2. Pusrisikan sudah melakukan reviu renstra pada tahun 2023 namun belum disertai dengan perbaikan target kinerja tahun 2024. Sehingga pada pembahasan perbandingan indikator kinerja tahunan dengan indikator kinerja jangka menengah masih membandingkan dengan target yang sebelumnya.

Dari permasalahan di atas, Pusrisikan dapat melakukan beberapa tindakan lanjut yang dilakukan yaitu :

1. Untuk meningkatkan nilai IKPA Pusrisikan, terutama pada indikator Deviasi Hal. III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja

Kontraktual, dan Pengelolaan UP & TUP, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga agar indikator Deviasi Hal. III DIPA tidak melebihi nilai optimum, perlu dilakukan penyesuaian RPD pada Halaman III DIPA per jenis belanja setiap triwulan serta lebih memperhitungkan apabila terdapat anggaran dengan status blokir,
 - b. Untuk meningkatkan indikator Penyerapan Anggaran, agar merealisasikan anggaran sesuai target yang sudah ditetapkan setiap triwulan, menjaga konsistensi realisasi dari awal tahun hingga akhir tahun mengingat penghitungan komponen nilai realisasi dalam IKPA dihitung secara akumulasi dari awal tahun hingga akhir tahun serta melakukan koordinasi antara tim kerja dalam memanfaatkan dana yang sudah ditarik sehingga antara RPD dan realisasi kegiatan sesuai,
 - c. Untuk meningkatkan indikator Belanja Kontraktual, agar belanja kontraktual dengan nilai di bawah Rp 200.000.000 pelaksanaannya dilaksanakan pada Triwulan I dengan rencana realisasi belanja modal dan pemeliharaan disiapkan dengan data dukung yang tepat sehingga pelaksanaannya dapat tepat waktu,
 - d. Untuk meningkatkan indikator Pengelolaan UP & TUP, agar menghitung kembali kebutuhan operasional rutin bulanan satker dalam menggunakan UP tunai secara efektif dan efisien sehingga pertanggungjawaban UP dan TUP dapat tepat waktu serta maksimal tanpa adanya setoran pengembalian dana TUP ke kas negara.
2. Pusrisikan melakukan reuiu renstra dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan kebijakan terkait perubahan target perjanjian kinerja di tahun 2023.

Namun demikian, tingkat pencapaian kinerja secara umum Tahun 2023 sebesar 111,38% dipandang lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 104,90%.



#2023
#HNP THRIVE



pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan Perikanan sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan terbesar bagi pembangunan nasional secara langsung dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dalam mewujudkan kemandirian ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, harus diakui bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perikanan sehubungan dengan dinamika lingkungan strategis domestik dan global, antara lain berkaitan dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk, kemiskinan, kebutuhan energi, ketahanan pangan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Keadaan ini semakin bertambah berat dengan adanya tantangan persaingan yang semakin ketat berkaitan dengan bergulirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0.

Permasalahan dan tantangan tersebut perlu segera diatasi, baik melalui inovasi teknologi maupun kebijakan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan berbagai temuan yang tepat guna, inovasi baru dan juga teknologi yang inovatif dari lembaga riset perikanan secara terus menerus dan berkelanjutan, agar dapat merespon permasalahan dan tantangan guna menguatkan struktur perekonomian ataupun daya saing usaha di bidang perikanan secara aman dan bijaksana.

Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) sebagai lembaga riset di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, serta teknologi alat dan mesin perikanan diharapkan dapat menjadi pusat inovasi teknologi perikanan yang handal untuk mewujudkan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005–2025 “Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan

Nasional. Selain itu, dukungan IPTEK yang kuat di era revolusi industri 4.0 dapat dimanfaatkan sebagai keunggulan komparatif menuju peningkatan produksi, industrialisasi ataupun ekspor. Pada saat yang sama, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual termasuk Hak Paten semakin menjadi kecenderungan di dunia global, sehingga sangat mendesak bagi bangsa Indonesia untuk merebut keunggulan IPTEK melalui usaha-usaha mandiri.

Sesuai dengan perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). Dengan paradigma baru ini, orientasi kerja Pusat Riset Perikanan adalah menciptakan paket teknologi yang inovatif dalam sistem produksi perikanan, menjadikan iptek sebagai dasar pengembangan usaha perikanan di masyarakat/pengguna yang kompetitif dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta sinergi kegiatan riset yang berdaya saing. Untuk itu, kegiatan riset harus berorientasi kepada kebutuhan pengguna (*user oriented*), tanpa mengabaikan pengembangan teknologi yang bersifat *demand driving*, sehingga ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem kelembagaan perikanan yang dihasilkan lebih tepat guna (spesifik lokasi dan pemakai) dan dapat sekaligus futuristik. Riset harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan calon pengguna outputnya sehingga output cepat menjadi *outcome* yang tepat sasaran dan tepat cara agar berdampak dalam percepatan pengembangan.

Tujuan

Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Negara telah menetapkan target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut kemudian disusun dalam Laporan Kinerja Pusriskan sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pusriskan ini, yaitu :

1. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Riset Perikanan kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
2. sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pusat Riset Perikanan pada Tahun 2023 dalam upaya memperbaiki kinerja selanjutnya; dan
3. sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) yang sebelumnya memiliki nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Puslitbangkan), merupakan penggabungan dua nomenklatur yang berbeda, yakni Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (P4KSI) serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya (P4B), dibentuk dan ditugaskan untuk melaksanakan riset dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pemulihan sumber daya ikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.1/MEN/2001 tanggal 02 Januari 2001, Peraturan Menteri DKP Nomor. 07/PER/MEN/2005 tanggal 24 Juni 2005.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Riset Perikanan mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas dalam melakukan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusrisan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan;
2. penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan;
3. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset perikanan; dan
4. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam bentuk Surat Tugas untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja pada Pusat Riset Perikanan. Sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pusat Riset Perikanan nomor B.789/BRSDM.3/KP.444/IV/2023 tanggal 3 April 2023 yang telah dilakukan revisi menjadi Surat Tugas Kepala Pusat Riset Perikanan nomor B.1869/BRSDM.3/KP.440/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 menyebutkan bahwa memberi tugas kepada seluruh pegawai Pusat Riset Perikanan untuk 1) menjadi Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja; 2) memastikan pencapaian Indikator Kinerja dan pelaksanaan Uraian Fungsi dengan penuh tanggung jawab; dan 3) menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Pusat Riset Perikanan. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Pusat Riset Perikanan,

Nomor DIPA-032.01.1.622081/2023, tanggal 30 November 2022. Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Susunan Keanggotaan Tim Kerja Pusat Riset Perikanan terdiri dari 4 (empat) tim kerja antara lain 1. Tim Kerja Program; 2. Tim Kerja Keuangan. 3. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum; 4. Tim Kerja Kemitraan dan Pengelolaan PNBPN. Masing-masing tim kerja memiliki ketua dan anggota dalam melaksanakan fungsinya.

Tim kerja Program memiliki fungsi a. Koordinasi dan penyusunan Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja Pusat Riset Perikanan; b. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kinerja Pusat Riset Perikanan; dan c. Koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, program, penganggaran, monitoring, evaluasi, pelaporan dan penyiapan bahan pimpinan. Dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 3 (tiga) Indikator Kinerja seperti Nilai PM Sakip Pusat Riset Perikanan, Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan, dan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan. Tim kerja program terdiri dari 1 (satu) Ketua, dan 14 (empat belas) Anggota yang terdiri dari 9 (sembilan) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 5 (lima) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Tim kerja keuangan memiliki fungsi a. Koordinasi dan tindak lanjut penyelesaian terhadap nilai temuan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan; b. Koordinasi dan pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan; c. Koordinasi kinerja pengelolaan dan pelaksanaan anggaran lingkup Pusat Riset Perikanan. Dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 3 (tiga) Indikator Kinerja seperti Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Perikanan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Perikanan 2023, Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Pusat Riset Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, dan Nilai IKPA Pusat Riset Perikanan. Tim kerja keuangan terdiri dari 1 (satu) Ketua, dan 12 (dua belas) Anggota yang terdiri dari 9 (sembilan) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 (tiga) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

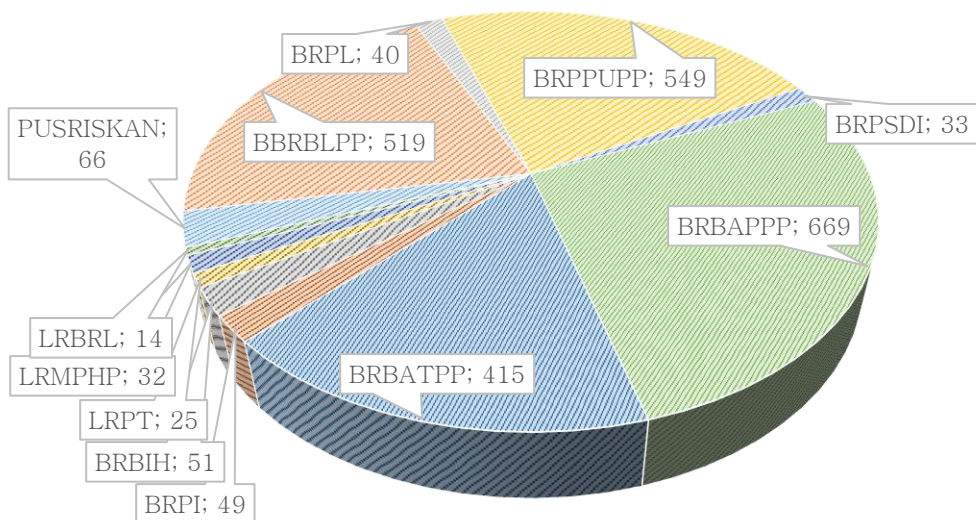
Tim kerja Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum memiliki fungsi a. Koordinasi, monitoring dan evaluasi capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Perikanan; b. Koordinasi dan monitoring penerapan system manajemen pengetahuan pada aplikasi manajemen pengetahuan yang ditunjuk; dan c. Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengelolaan data, diseminasi dan publikasi, pengelolaan aset dan pengelolaan administrasi SDM Aparatur. Dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 3 (tiga) Indikator Kinerja seperti Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Perikanan, Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Pusat Riset Perikanan, dan Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya Pusat Riset Perikanan. Tim kerja Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum terdiri dari 1 (satu) Ketua, dan 33 (tiga puluh tiga) Anggota yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 10 (sepuluh) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Tim Kerja Kemitraan dan Pengelolaan PNBPN memiliki fungsi a. Koordinasi dan pelaksanaan layanan eksternal dalam kemitraan lingkup Pusat Riset Perikanan, termasuk dukungan SFV; dan b. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan PNBPN Lingkup Pusat Riset Perikanan. Dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 2 (dua) Indikator Kinerja seperti Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusriskan dan Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan. Tim kerja Kemitraan dan Pengelolaan PNBPN terdiri dari 1 (satu) Ketua, dan 11 (sebelas) Anggota yang terdiri dari 8 (delapan) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 (tiga) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Pusat Riset Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dibantu oleh unit pelaksana teknis yaitu Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP); Balai Riset Perikanan Laut (BRPL); Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP); Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI); Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan

Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP); Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP); Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH); Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI); Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT); Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL); dan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP).

Keragaan Pegawai

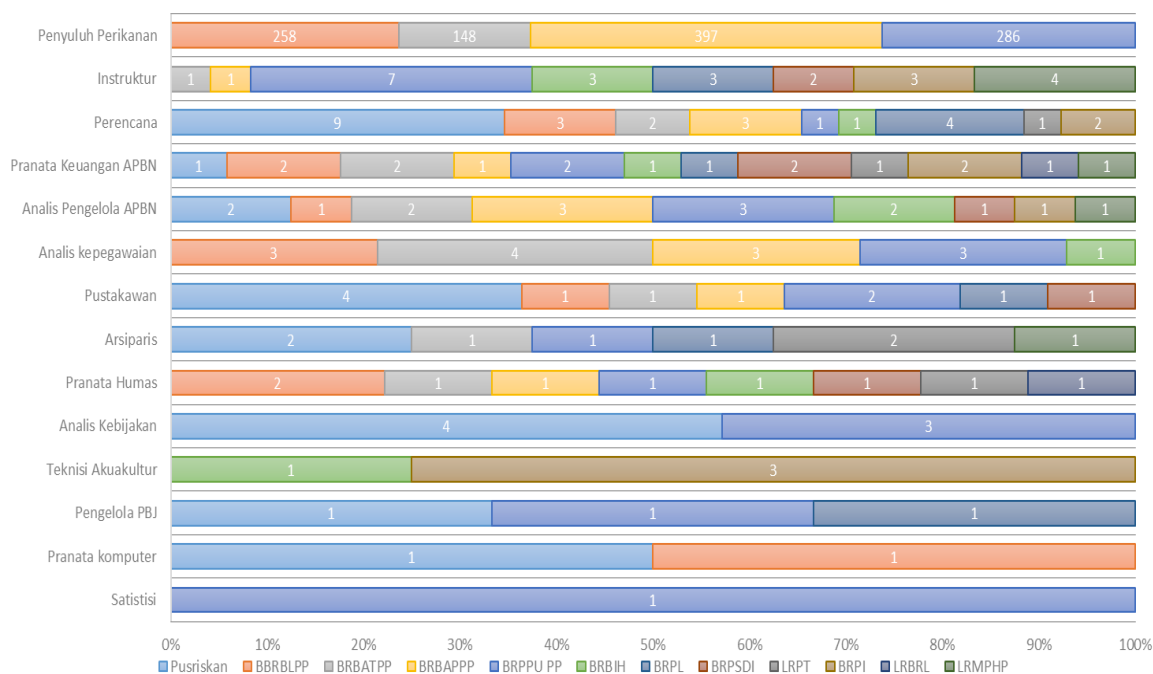


Gambar 1 Diagram Pie Jumlah Pegawai Lingkup Pusriskan
(Jumlah PNS = 1431 orang; PPPK = 162 orang;
Tenaga Kontrak = 243 orang; Penyuluh Bantu = 626 orang)

Jika dilihat dari gambar keragaan pegawai, BBRBLPP, BRPBAPPP, BRPBATPP dan BRPPUPP merupakan 4 (empat) Satker yang mengemban tugas sebagai Satminkal Penyuluhan disamping tugasnya sebagai satker Riset sehingga mempunyai pegawai penyuluh yang relatif besar dibanding pegawai Riset di satker lain. Jumlah Satker yang mempunyai pegawai paling banyak terdapat pada BRPBAPPP, sedangkan jumlah pegawai yang paling sedikit pada LRBRL.

Sumber Daya Manusia dengan jabatan Riset Perikanan seperti Peneliti, Perekayasa, dan Teknisi Laboratorium telah dialih rugarikan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Proses integrasian ke

BRIN telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Telah terbit pula Keputusan Presiden tentang penetapan jabatan peneliti/perekayasa ahli utama dan Keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang penetapan jabatan peneliti ahli madya, muda, dan pertama di lingkungan BRIN. Selain itu, Jumlah SDM dalam jabatan fungsional tertentu mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya dikarenakan dalam periode akhir TA.2022 ada kebijakan nasional penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional tertentu (transformasi). Selain itu ada juga pegawai fungsional umum yang berpindah jabatan ke JF tertentu sehingga komposisi dan jumlah jabatan fungsional tertentu di lingkup Pusrisikan terlihat seperti di Gambar berikut ini:

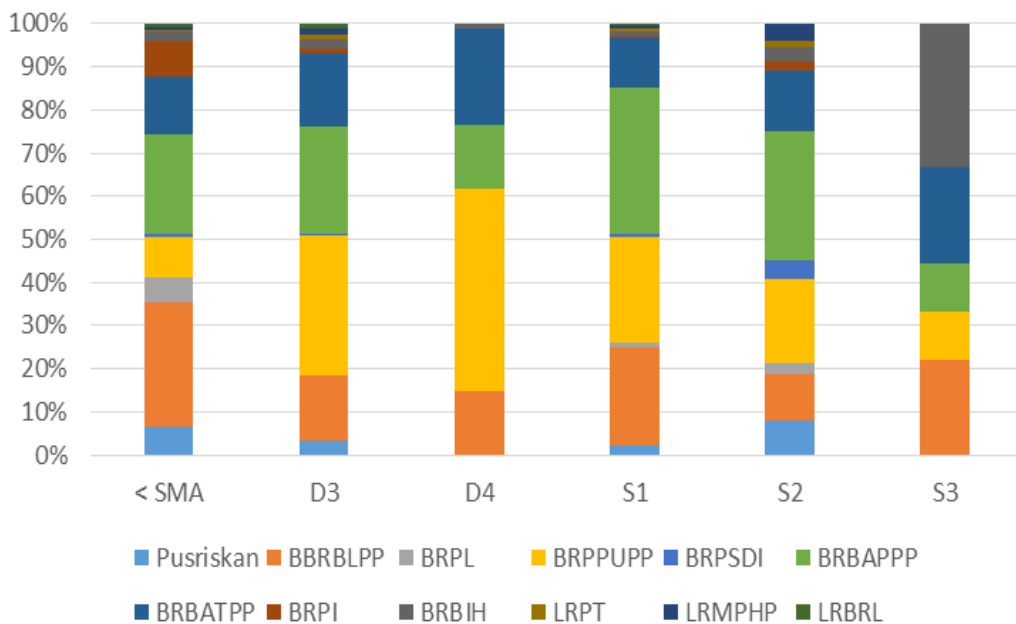


Gambar 2 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Lingkup Pusrisikan

Dapat dilihat pada Gambar diatas terdapat 14 (empat belas) jabatan fungsional tertentu yang diemban oleh pegawai di lingkup Pusat Riset Perikanan. Dengan jumlah jabatan fungsional terbanyak adalah Penyuluh Perikanan.

Apabila dilihat dari jenjang pendidikan, dari data per Desember 2023, menurut tingkat pendidikan: S3 sebanyak 9 orang, S2 sebanyak 149 orang, S1 sebanyak 931 orang, D4 sebanyak 102 orang, D3

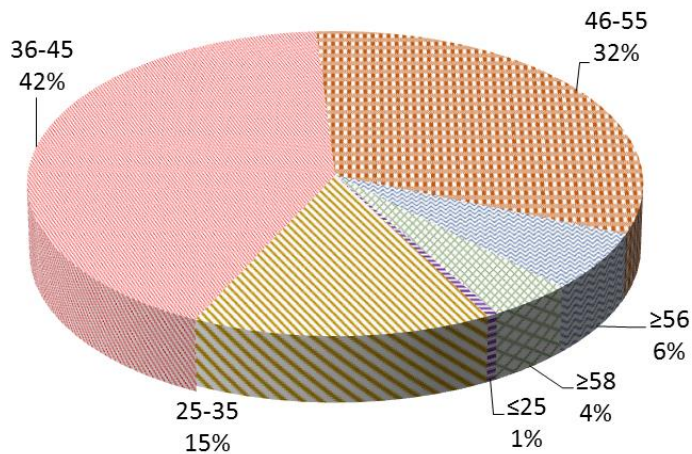
sebanyak 185 orang, dan \leq SMA sebanyak 217 orang. Seperti yang dapat dilihat dari Gambar dibawah. Hanya beberapa satuan kerja yang memiliki pegawai dengan tingkat Pendidikan strata 3 atau doctoral, sedangkan masih banyak pegawai di tingkat SLTA sampai dengan D3 atau diploma.



Gambar 3 Diagram Sebaran PNS menurut Tingkat Pendidikan Lingkup Pusriskan

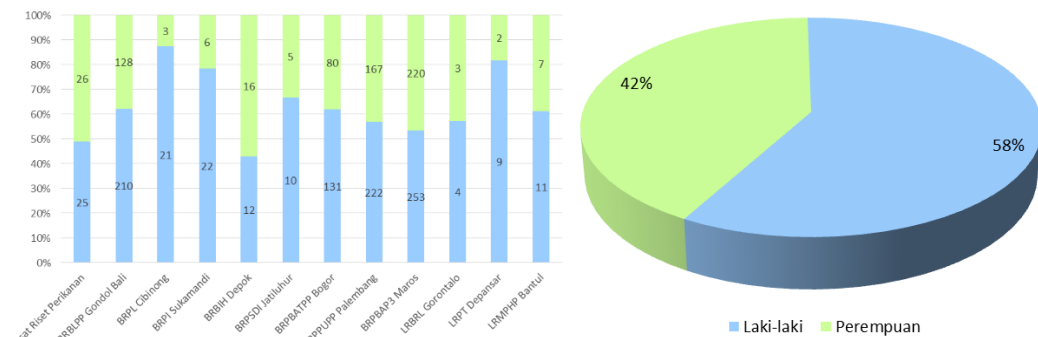
Sebagai upaya dalam meningkatkan jenjang pendidikan pegawai Lingkup Pusriskan maka dilaksanakan tugas belajar bagi ASN Lingkup Pusriskan. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS.

Apabila dilihat dari rentang umur pegawai lingkup Pusriskan dapat dilihat bahwa rentang umur dengan jumlah pegawai terbanyak adalah pada rentang umur 36-45 tahun sebanyak 667 pegawai. Sedangkan rentang umur dengan jumlah pegawai yang paling sedikit adalah rentang umur dibawah 25 tahun sebanyak 8 pegawai. Sebaran pegawai dengan rentang umur tertentu dapat dilihat pada Gambar dibawah.



Gambar 4 Diagram Sebaran PNS Lingkup Pusriskan dalam rentang umur

Apabila dilihat dari sisi gender, pegawai di lingkup Pusriskan secara umum, proporsi jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Hanya Pusriskan dan BRBIH Depok yang memiliki jumlah pegawai perempuan yang lebih banyak dari pada pegawai laki-laki. Sebaran pegawai berdasarkan gender dapat dilihat pada Gambar dibawah.



Gambar 5 Diagram perbandingan gender pegawai lingkup Pusriskan

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2023

Sistem Penyajian Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban yang dapat menggambarkan kinerja instansi pemerintah secara jelas dan transparan kepada para pemangku

kepentingan (*stakeholders*), mengenai keberhasilan/kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja Tahunan ini berisi pertanggungjawaban kinerja Pusrisikan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014. Laporan Kinerja (LKj) ini mengkomunikasikan capaian kinerja (*Performance Results*) 2023 sendiri dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2023 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana dan atau penetapan kinerja (komitmen kinerja) yang telah dilakukan akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang dengan membandingkan hasil. Demikian pula akan disajikan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun berjalan, selain juga melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Dalam mengaitkan dengan anggaran maka, realisasinya akan digunakan untuk membahas perwujudan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun sistemetika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2023..
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang BPPSDM seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Pusrisikan.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis Pusrisikan 2020–2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Pusrisikan Tahun 2023 serta Pengukuran Kinerja.

4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

Potensi dan Permasalahan

Kegiatan Pusat Riset Perikanan didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana eks riset yang sebagian besar sudah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Penguji karena telah menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005). Riset Perikanan memiliki: laboratorium biologi, data, limnologi, dan oseanografi, serta kapal riset (perikanan tangkap); laboratorium basah, biologi, kimia, penyakit, bioteknologi, *multi species hatchery*, *biosecurity hatchery*, pakan, patologi dan kesehatan ikan, nutrisi dan bioteknologi, tanah, air dan biologi, *feed processing*, reproduksi, basah (*hatchery*) dan pakan alami (perikanan budidaya), uji numerik dan uji fisik. Laboratorium tersebut sebagian telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Penguji karena telah menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005). Selain itu seluruh unit kerja di lingkungan Pusat Riset Perikanan memiliki aset berupa kolam yang sebelumnya merupakan kolam uji riset, saat ini dilakukan optimalisasi aset secara bertahap untuk meningkatkan PNBPN maupun untuk menunjang kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV) yang merupakan kegiatan unggulan BPPSDM. Dimana Pusar Riset Perikanan merupakan koordinator SFV khususnya untuk di Unit Pelayanan Teknis (UPT)

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset perikanan untuk mendukung pembangunan KP dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan

Inovasi Nasional, seluruh peneliti dilingkungan BPPSDM melakukan penyesuaian dengan melakukan perpindahan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga akan terjadi transformasi kelembagaan Pusat dan UPT lingkup BPPSDM dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Pasal 6 “Badan Riset Sumberdaya Manusia (BPPSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM). Sampai Triwulan IV, KKP masih menyiapkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tersebut, sehingga Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPPSDM untuk level Eselon 2 dan Unit Pelaksana Teknis masih berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020.



#2023
HHP THRIVE



perencanaan kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Lingkungan Strategis

BRSDM KP memiliki mandat untuk melaksanakan program riset dan penyiapan sumber daya manusia KP, diantaranya adalah melalui penyelenggaraan riset, pendidikan, dan pelatihan, serta penyuluhan secara terpadu dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Mandat tersebut harus diikuti penyusunan rencana strategis yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Hal ini akan mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan sektor KP di Indonesia (khususnya melalui peran riset dan SDM).

Lingkungan strategis ini secara teoritis dapat diartikan sebagai situasi strategis baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan BRSDM KP Tahun 2020-2024. Situasi strategis bersumber dari faktor internal (*Internal Factor Strategic*) dan eksternal (*External Factor Strategic*) yang bersifat statis maupun dinamis yang tercakup dalam perspektif wilayah (sektoral, regional, nasional, dan global).

Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020–2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi BRSDM pada Tahun 2020–2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Misi

Misi BRSDM adalah menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu:

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BRSDM KP, maka tujuan yang ingin dicapai selama Tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan;
3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing;
4. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan;
5. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 1 Keterkaitan visi, misi dan tujuan dalam Renstra BRSDM KP 2020–2024

Visi	Misi	Tujuan
Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong	Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
	Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
	Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
		4. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.

Visi	Misi	Tujuan
	Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	5. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP terdiri dari :

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
- SS-2 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- SS-3 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat**
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat**
- SS-5 Tatakelola SDKP bertanggung jawab
- SS-6 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
- SS-7 Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif
- SS-8 Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas**

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BPPSDM tahun 2020-2024, maka sasaran program (SP) yang akan dicapai BPPSDM pada Tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

- SP-1 SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri
- SP-2 SDM KP Peserta Diklat untuk Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)
- SP-3 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan
- SP-4 Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat
- SP-5 Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan

SP-6 Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM

Sedangkan Pusrisikan sendiri memiliki sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran program BPPSDM (SP-6) yang diturunkan dari sasaran strategis KKP (SS-8) yaitu :

SK-1 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Reviu Renstra Pusat Riset Perikanan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Pusat Riset Perikanan telah melakukan reviu atas Renstra Pusat Riset Perikanan. Pada tahun 2021, Pusat Riset Perikanan telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renstra Pusat Riset Perikanan Nomor 340/BRSDM.3/RC.221/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021. Sedangkan pada tahun 2022, Pusat Riset Perikanan telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan dan pada tahun 2023 ini, Pusat Riset Perikanan telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 2 (dua Sasaran Kegiatan dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan.

Reviu atas perubahan target indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator kinerja yang tercantum pada Bab IV Bagian C.1 dokumen Renstra Pusat Riset Perikanan Nomor 340/BRSDM.3/RC.221/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Dasar perubahan target IKK pada Tahun 2022 adalah dokumen Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2022, tindak lanjut hasil Rapim KKP, Rencana Kerja BRSDM Tahun 2022, capaian IKU tahun 2021 dan usulan pemutakhiran terkait rencana kerja lingkup Pusat Riset

Perikanan. Beberapa IKK yang mengalami penyesuaian dan/atau perubahan volume target.

Reviu atas perubahan target indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator kinerja yang tercantum pada Bab IV Bagian C.1 dokumen Renstra Pusat Riset Perikanan Nomor 340/BRSDM.3/RC.221/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Dasar perubahan target IKK tahun 2023 adalah dokumen Keputusan Menteri KP Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2023, tindak lanjut hasil Rapim KKP, Renja BRSDM Tahun 2023, capaian IKU tahun 2022 dan usulan pemutakhiran terkait rencana kerja lingkup Pusat Riset Perikanan. Beberapa IKK yang mengalami penyesuaian dan/atau perubahan volume target adalah sebagai berikut:

1. IKK yang tidak tercantum dalam Renstra 2020 - 2024, namun tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pusat Riset Perikanan berdasarkan surat Sekretaris Badan nomor B.362/BRSDM.1/RC.610/I/2023 hal : Penyampaian PK BRSDM Tahun 2023 tgl. 16 Januari 2023 adalah :
 - a. Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Milyar)
 - b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Perikanan (NSPK)
 - c. Nilai PM SAKIP Pusat Riset Perikanan (nilai)

2. IKK yang tercantum dalam Renstra 2020 - 2024, namun tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pusat Riset Perikanan karena tidak ada kontribusi dari kegiatan pelayanan teknis riset karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN adalah:
 - a. Data dan/atau Informasi Hasil Riset Perikanan (Rekomendasi Kebijakan) yang dimanfaatkan (data/kajian)
 - b. Hasil riset perikanan yang dimanfaatkan oleh sektor industri (hasil riset)
 - c. Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (paket)

- d. Rekomendasi hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (paket)
 - e. Rekomendasi potensi sumber daya perikanan yang terpetakan dan berkelanjutan pada 11 WPP (kajian)
 - f. Rekomendasi kebijakan Hasil Riset Perikanan (Paket)
 - g. Data dan/atau informasi Hasil Riset Perikanan (rekomjak)
 - h. Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI (paket)
 - i. Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NRI di Perairan Daratan (WPP NRI PD) (paket)
 - j. Karya tulis ilmiah riset perikanan yang dipublikasikan (dokumen)
 - k. Produk biologi hasil riset perikanan (produk)
 - l. Penerapan teknologi adaptif lokasi hasil riset perikanan (paket)
 - m. Teknologi Hasil Riset Perikanan (produk)
 - n. Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan (paket)
 - o. Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan siap Guna (paket)
 - p. Sarana dan prasarana riset perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (paket)
 - q. Sertifikasi kelembagaan riset perikanan (lembaga)
 - r. Unit Kerja lingkup Pusat Riset Perikanan yang lolos penilaian menuju WBK
 - s. Unit Kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pusat Riset Perikanan (unit)
3. Perubahan volume target IKK tahun 2023 pada rencana strategis antara lain :
- a. Jejaring dan/atau Kerjasama riset Perikanan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti (kesepakatan) semula 50 menjadi 19.
 - b. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup Pusat Riset Perikanan (%) semula ≤ 1 menjadi ≤ 0.5
 - c. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Perikanan (indeks) semula 75 menjadi 78

- d. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (nilai), semula 80,25 menjadi 91
- e. Persentase Unit kerja Lingkup Pusat Riset Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar semula 86 menjadi 92
- f. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Pusat Riset Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) semula 70 menjadi 74
- g. Nilai IKPA Pusat Riset Perikanan (nilai) semula 90 menjadi 89
- h. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (nilai) semula 88 menjadi 82

Rencana Kerja Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, mision, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja Pusrisikan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2 Rencana Kerja Pusrisikan TA 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. 000)	ANGGARAN REVISI I (Rp. 000)	ANGGARAN REVISI II (Rp. 000)
1	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2.323.250	2.323.250	Tidak Digunakan
	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	2.323.250	2.323.250	Tidak Digunakan
2	Program Dukungan Manajemen	128.251.000	124.734.752	123.717.469
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	128.251.000	124.734.752	123.717.469
Total Anggaran Pusat Riset Perikanan Tahun 2023		130.574.250	127.058.002	123.717.469
Tanggal Pengesahan		9 Januari 2023	20 Juni 2023	30 November 2023

Perjanjian kinerja Pusat Riset Perikanan telah di revisi sebanyak 2 (dua) kali sepanjang Tahun 2023. Berikut tabel penjelasan revisi Perjanjian Kinerja Pusat Riset Perikanan.

Tabel 3 Penjelasan Revisi Perjanjian Kinerja Pusat Riset Perikanan

No	Poin Perubahan	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
I. Revisi I			
1.	Revisi Pemutakhiran Anggaran Pusat Riset Perikanan 2023 (Pergeseran anggaran operasional antar satuan kerja Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dalam 1 (satu) unit eselon 1 yang sama BRSDM dalam hal pagu anggaran berubah dilakukan dalam rangka tindak lanjut Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Kapal Bawal Putih III tanggal 30 Maret 2023 senilai Rp. 3.516.248.000 setelah dilakukan perhitungan realisasi anggaran operasional dan docking kapal Bawal Putih III)	128.251.000.000	124.734.752.000
2.	Bulan penandatanganan Perjanjian Kinerja	9 Januari 2023	20 Juni 2023
II. Revisi II			
1.	Revisi data anggaran PK level 2 - Revisi DIPA 5 : Revisi Belanja Modal dari Optimalisasi Anggaran Buka Blokir Tahun 2023 - Revisi DIPA 6 : Revisi Pemanfaatan Sisa Belanja Pegawai Pusrisikan untuk Belanja Operasional Tahun 2023	127.058.002.000	123.717.469.000
2.	Revisi Target dan Narasi Indikator Kinerja 2023 - Surat Set.BRSDM Nomor:B.7579/BPPSDM.1/RC.610 /XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 hal: Penyampaian revisi PK BPPSDM tahun 2023 dan rancangan PK BPPSDM tahun 2024	- Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Miliar) dengan target 1,668 - Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Perikanan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Perikanan 2023 dengan target ≤0,5	- Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Miliar) dengan target 1,725 - Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK...(nama unit level II atau III) dengan target ≤0,5

No	Poin Perubahan	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
		- Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai) dengan target 92	- Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai) dengan target 93
		- Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusrisikan (Kemitraan) dengan target 19	- Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusrisikan (Kemitraan) dengan target 30
3.	Revisi Target dan Narasi Indikator Kinerja 2023 - Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor:938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 hal : Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial Tahun 2024	- Nilai IKPA Pusat Riset Perikanan target 89	- Nilai IKPA Pusat Riset Perikanan target 93,75
4.	Bulan penandatanganan Perjanjian Kinerja	20 Juni 2023	30 Nopember 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala Pusrisikan dengan Kepala BPPSDMKP. Penetapan kinerja Pusrisikan Tahun 2023 atau Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran dan target indikator kinerja kegiatan (IKK). IKK tersebut merupakan salah satu Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program dari indikator tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yakni kegiatan dukungan manajemen internal lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (2378) yang terdapat pada seluruh unit kerja dilingkup Pusat Riset Perikanan dengan rincian anggaran antara lain.

Tabel 4 Anggaran unit kerja dilingkup Pusat Riset Perikanan

NO	SATKER	PAGU (Rp.) Januari	PAGU (Rp.) Juni	PAGU (Rp.) November
1	Pusrisikan, Ancol	18.935.318.000	18.935.318.000	14.779.483.000
2	BRPL, Ancol	15.818.495.000	6.539.862.000	6.013.402.000
3	BRPPU-PP, Palembang	15.972.640.000	15.124.592.000	15.380.768.000
4	BRPSDI, Jatiluhur	13.239.107.000	7.342.015.000	6.331.689.000
5	BBRBL-PP, Gondol	15.124.592.000	4.571.491.000	16.397.567.000
6	BRPBAP-PP, Maros	10.880.559.000	15.818.495.000	17.469.561.000
7	BRPBAT-PP, Bogor	10.086.705.000	15.972.640.000	13.066.346.000
8	BRBIH, Depok	7.342.015.000	13.239.107.000	10.880.559.000

NO	SATKER	PAGU (Rp.)	PAGU (Rp.)	PAGU (Rp.)
		Januari	Juni	November
9	BRPI, Sukamandi	10.056.110.000	10.880.559.000	10.486.705.000
10	LRPT, Bena	4.571.491.000	10.086.705.000	4.764.171.000
11	LRBRL, Gorontalo	3.669.735.000	3.669.735.000	3.669.735.000
12	LRMPHP, Bantul	4.877.483.000	4.877.483.000	4.477.483.000
TOTAL		130.574.250.000	127.058.002.000	123.717.469.000

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Pusrisikan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Pusrisikan dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Selama tahun 2023 Pusrisikan telah melakukan revisi perjanjian kinerja sebanyak 2 kali. Revisi I merupakan revisi Pemutakhiran Anggaran Pusat Riset Perikanan 2023. Pergeseran anggaran operasional antar satuan kerja Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dalam 1 (satu) unit eselon 1 yang sama BRSDM dalam hal pagu anggaran berubah dilakukan dalam rangka tindak lanjut Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Kapal Bawal Putih III tanggal 30 Maret 2023 senilai Rp. 3.516.248.000 setelah dilakukan perhitungan realisasi anggaran operasional dan docking kapal Bawal Putih III. Sedangkan revisi II merupakan revisi data anggaran PK level 2 yang terdiri dari Revisi Belanja Modal dari Optimalisasi Anggaran Buka Blokir Tahun 2023 dan revisi Pemanfaatan Sisa Belanja Pegawai Pusrisikan untuk Belanja Operasional Tahun 2023. Selain itu, revisi juga dilakukan terhadap Target dan Narasi Indikator Kinerja 2023 berdasarkan Surat Sekretariat BRSDM Nomor:B.7579/BPPSDM.1/RC.610/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 hal: Penyampaian revisi PK BPPSDM tahun 2023 dan rancangan PK BPPSDM tahun 2024. Revisi Target dan Narasi Indikator Kinerja 2023 juga dilakukan berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor:938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1

November 2023 perihal Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial Tahun 2024.

Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk sasaran kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Keseluruhan IKK Pusriskan pada Tahun 2023 untuk semua SK berjumlah 11 (sebelas) IKK. Sebagai alat ukur pencapaian SS, target 11 (sebelas) IKK Pusriskan yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Pusriskan TA 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET JANUARI	TARGET JUNI	TARGET NOVEMBER
1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Perikanan (NSPK)	4	4	Tidak Digunakan
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Miliar)	1,668	1,668	1,725
		3	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%)	≤0,5	≤0,5	≤ 0,5
		4	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)	78	78	78
		5	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai)	76	76	76
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)	92	92	93
		7	Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92	92	92

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET JANUARI	TARGET JUNI	TARGET NOVEMBER
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%)	75	75	80
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	89	89	93,75
		10	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	82	82	82
		11	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)	19	19	30
		12	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya Pusat Riset Perikanan (%)	100	100	100

Pengukuran Kinerja

Nilai kinerja adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK. Status capaian yang ditunjukkan dengan pewarnaan ditentukan dari perbandingan antara capaian dengan target. Untuk menghitung nilai kinerja perlu diperhatikan bobot masing-masing IKK dengan sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKK, terdiri dari Outcome, Output Kendali Rendah, Output Kendali Tinggi, dengan bobot seperti tabel berikut:

Tabel 6 Bobot validasi IKK

No	Validitas IKU	Bobot
1	Outcome	5
2	Output Kendali Rendah	3
3	Output Kendali Tinggi	2

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas Outcome yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh stakeholder/customer pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau panjang.
2. Validitas Output Kendali Rendah yaitu yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator.
3. Validitas Output Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator.

Selanjutnya ditentukan pola perhitungan indikator kinerja. Pola Perhitungan terdiri dari Akumulasi, Rata-rata dan Nilai Posisi Akhir. Setelah ditentukan pola perhitungannya, ditentukan juga metode cascading. Metode Cascading merupakan metode penurunan dari level unit pemilik indikator kinerja tersebut ke level unit dibawahnya, berisi pilihan Adopsi Langsung, Komponen Pembentuk, Lingkup Dipersempit, atau Buat Baru.

1. Adopsi langsung dilihat dari kalimat dan definisi indikator kinerja pada level yang lebih tinggi diadopsi secara penuh oleh level yang lebih rendah. Indikator kinerja yang di-cascading menggunakan metode ini harus memiliki output yang identik/sama pada tiap level.
2. Komponen Pembentuk dilihat dari kalimat dan definisi indikator kinerja unit/satuan di level yang lebih tinggi diturunkan ke lebih dari satu unit dengan kalimat yang berbeda sesuai peran Unit tersebut dalam pencapaian indikator kinerja. Hal ini karena nilai indikator kinerja tersebut dibentuk oleh beberapa Unit di level bawahnya dengan kontribusi yang berbeda-beda. Capaian indikator kinerja pada Unit/satuan di level yang lebih tinggi merupakan akumulasi dari capaian indikator kinerja pada pada Unit/satuan di level yang lebih rendah.
3. Lingkup dipersempit dilihat dari kalimat dan definisi indikator kinerja Unit/satuan di level yang lebih tinggi diturunkan ke lebih

dari satu Unit kerja dengan kalimat yang serupa namun dengan ruang lingkup lebih sempit. Hal ini karena nilai indikator kinerja tersebut dibentuk oleh beberapa unit di level bawahnya dengan metode yang sama namun ruang lingkup sesuai unit kerja yang melaksanakan. Capaian indikator kinerja unit/satuan di level yang lebih tinggi merupakan rata-rata dari capaian indikator kinerja unit/satuan di level yang lebih rendah.

4. Buat baru dilihat dari indikator kinerja yang bukan merupakan turunan dari atasannya, melainkan baru dibentuk di level yang bersangkutan. indikator kinerja dengan metode Buat Baru dapat merupakan indikator kinerja yang berkontribusi secara tidak langsung pencapaian indikator kinerja atasan, merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tugas spesifik dari unit yang bersangkutan yang tidak berkorelasi dengan atasannya, indikator kinerja yang dibentuk karena ada tugas khusus atau mandat (*mandatory*) dari atasannya.

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan mensepakati standar status kinerja untuk nilai kinerja dengan klasifikasi polarisasi. Polarisasi terdiri dari Maximize, Minimize, atau Stabilize. Maximize yaitu semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin rendah kinerja semakin buruk. Minimize yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin tinggi semakin buruk. Stabilize yaitu semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Berikut klasifikasi polarisasi yang ditentukan:

Tabel 7 Klasifikasi target indikator kinerja

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 50\%$	$X > 50\%$	$X > 50\%$ atau $X < 50\%$	Sangat Kurang
$X = 50\% - < 70\%$	$X = 50\% - > 70\%$	-	Kurang
$X = 70\% - < 90\%$	$X = 70\% - > 90\%$	-	Cukup

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X=90\%-\lt 120\%$	$X=90\%-\gt 120\%$	$X=100\%$	Baik
$X\geq 110\%$	$X\leq 120\%$	-	Sangat Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: *Maximize* adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Status capaian nilai kinerja ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Tabel 8 Status Capaian Nilai Kinerja

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110-120
Baik	Nilai 90-<110
Cukup	Nilai 70-<90
Kurang	Nilai 50-<70
Sangat Kurang	Untuk Nilai <50
Belum Ada Penilaian	



#2023
HHP THRIVE



akuntabilitas kinerja

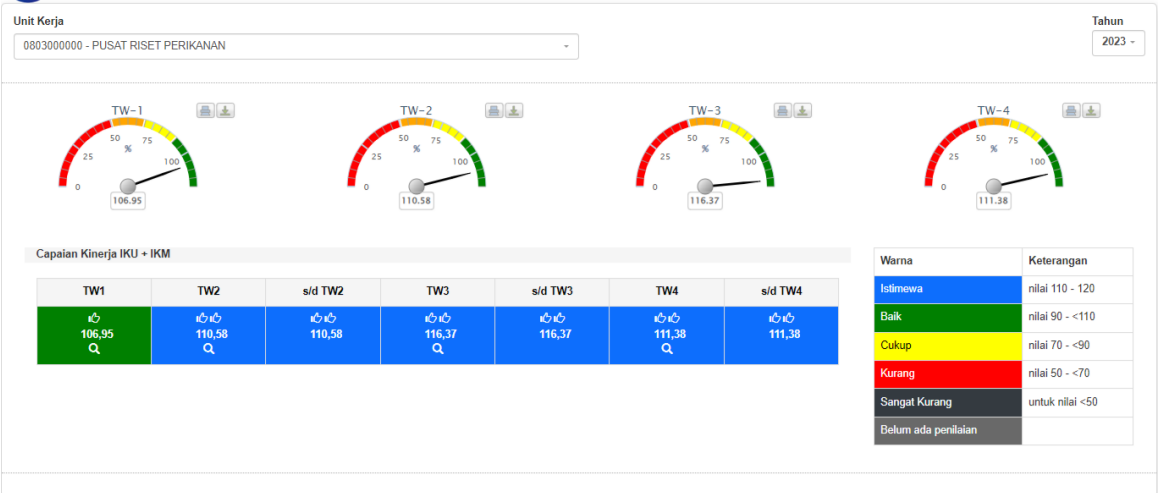
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Pusriskan mendapatkan mandat untuk melaksanakan 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dan mencapai target 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Nilai pencapaian kinerja pada Tahun 2023 dari Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) memiliki kinerja yang baik (di atas target yang telah ditetapkan). Pencapaian terhadap target kinerja Tahun 2023 pada awalnya mengalami kendala beberapa indikator kinerja Pusriskan masih dalam blokir anggaran terkait kegiatan perumusan kebijakan kelautan dan perikanan (6703) yang mendukung indikator kinerja kegiatan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Perikanan (NSPK). Sehingga sasaran kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan, dan baru melakukan kegiatan yang mendukung terpenuhinya layanan dokumen manajemen. Namun, pada awal Triwulan III Tahun 2023 dilakukan kebijakan Revisi DJA dalam rangka Revisi Belanja Modal dari Optimalisasi Anggaran Buka Blokir Tahun 2023 pada tanggal 30 Oktober 2023. Sehingga pada akhir tahun sudah tidak ada lagi anggaran yang diblokir.

Hasil Pengukuran capaian kinerja Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) dengan menggunakan aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id* menunjukkan capaian Tahun 2023 berwarna biru dengan nilai 111,38% dalam kategori Istimewa (110–120). Walaupun mengalami penurunan nilai dari Triwulan III (116,37%), namun masih meningkat dari Triwulan I (106,95%) dan Triwulan II (110,58%). Penurunan nilai ini dipengaruhi oleh revisi sasaran kegiatan, beberapa sasaran kegiatan pendukung indikator telah direvisi. Terpenuhinya capaian kinerja juga didukung oleh sataun kerja dibawah Pusat Riset Perikanan dan seluruh pegawai Lingkup Pusriskan dalam memenuhi kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 6 Nilai NPSS Pusat Riset Perikanan Aplikasi Kinerjaku Tahun 2023

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pusrisikan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

Capaian IKK Pusrisikan

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai

dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pusrisikan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis yang dituangkan pada penetapan kinerja Pusrisikan Tahun 2023 dapat tercapai. Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 9 Capaian IKK Pusat Riset Perikanan TA 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2023	CAPAIAN 2023	%
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Miliar)	1,725	3,402	120,00
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%)	≤0,5	0	120,00
		3	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)	78	90,77	116,37
		4	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai)	76	80,90	106,45
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)	93	97,33	104,66
		6	Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92	116,58	120,00
		7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%)	80	100	120,00
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	93,75	90,98	97,05
		9	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	82	85,96	104,83
		10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)	30	33	120,00
		11	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya Pusat Riset Perikanan (%)	100	100	100,00

SASARAN KEGIATAN 1

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Sasaran kegiatan Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker terdiri dari 11 (sebelas) indikator kinerja. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Miliar)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) satker dimaksud adalah memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Objek/Ruang Lingkup PNBP antara lain pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Indikator ini diperoleh dari nilai penerimaan bukan pajak sumber daya alam ditambahkan dengan penerimaan bukan pajak lainnya sehingga diperoleh penerimaan bukan pajak sektor kelautan dan perikanan. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk komponen pembentuk serta dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode triwulanan, yang dilaksanakan langsung oleh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa data realisasi pendapatan dari aplikasi OMSPAN per tanggal 10 bulan berikutnya atau surat penyampaian realisasi PNBP dari Kepala Satker ke Kepala Pusat. IKK ini merupakan Indikator Kinerja Mandatory (IKM).

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target 1,725 (satu koma tujuh dua lima) Miliar Rupiah. Capaian IKK Nilai PNBPsatker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Miliar) tersaji pada tabel berikut.

Tabel 10 Capaian IKK 1-Nilai PNBPsatker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Miliar)

IKK 1-Nilai PNBPsatker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Miliar)								
Realisasi			Tahun 2023			% Kenaikan 2022-2023	Renstra Pusrisikan 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
-	-	-	1,725	3,402	120,00	-	-	-

*IKK Baru

Pada Tahun 2023 ini, IKK Nilai PNBPsatker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Miliar) telah tercapai sebesar 3,402 (Rupiah Miliar) dari target Tahun 2023 sebesar 1,725 (Rupiah Miliar) atau terealisasi 197,29%, karena pada aplikasi kinerjaku nilai toleransi maksimal adalah 120,00% sehingga persentasenya adalah 120,00%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang baru pada Tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta belum memiliki target jangka menengah 2020-2024.

Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain seperti Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) capaian nilai PNBPsatker Tahun 2023 persentase capaian Pusrisikan lebih baik dibandingkan dengan persentase capaian Pusriskel. Dengan persentase capaian Pusrisikan sebesar 197% berbanding dengan 149% untuk Pusriskel, rincian capaian antara Pusrisikan dan Pusriskel adalah sebagai berikut tabel dan gambar berikut.

Tabel 11 Perbandingan IKK Nilai PNBPsatker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Miliar) dengan Eselon II Lainnya

	Pusrisikan	Pusriskel
Target	1,725	0,029
Realisasi	3,402	0,043
%	197,00	149,00

Perbandingan % Capaian PNBP Tahun 2023



Gambar 7 Perbandingan Persentase Capaian PNBP Tahun 2023 dengan Eselon II Lainnya

Faktor tercapainya indikator kinerja ini didukung dari optimalisasi lahan eks riset berupa lahan budidaya, laboratorium, gedung bangunan. Sehingga diperolehnya pendapatan dari beberapa penerimaan negara baik penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Selain itu, dengan adanya kontrak kinerja untuk penerimaan PNBP sehingga dapat memacu pendapatan dari setiap satuan kerja. Didukung juga komitmen pimpinan unit kerja dan kesanggupan tim kerja dalam kegiatan dalam mencapai target PNBP.

Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah telah dilakukan pendataan sarana prasarana yang baik lingkup Pusrisikan dan pengoptimalan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana. Selain itu, dilakukannya pemantauan dan evaluasi setiap bulannya. Agar kontrak kinerja yang ditargetkan dapat tercapai dengan baik.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan BMN dengan anggaran sebesar Rp.589.846.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.585.096.819 (99,19%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120,00% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,81%.

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) satuan kerja lingkup Pusrisikan antara lain :

Tabel 12 Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lingkup Pusriskan

No	Satuan Kerja	Jenis Penerimaan	Capaian PNBP (Rp. Miliar)
1	BBRBLPP, Gondol	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu; Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya	0,794
2	BRPPUPP, Palembang	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi; Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya; Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	0,197
3	BRPSDI, Jatilhur	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,028
4	BRPBAPPP, Maros	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi; Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya; Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	1,402
5	BRPBATPP, Bogor	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji; Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual; Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin; Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu; Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya; Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,300
6	BRBIH, Depok	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0,167
7	BRPI, Sukamandi	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0,494
8	LRBRL, Gorontalo	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu; Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0,019

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Pusat Riset Perikanan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang

didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2022 (*audited*) tidak melebihi $\leq 0,5\%$ dari total realisasi anggaran Unit Eselon II Tahun 2022.

Indikator ini diperoleh dari persentase jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan (LK) unit Eselon II Tahun 2022 terhadap jumlah realisasi anggaran unit Eselon II Tahun 2022. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan metode cascading buat baru serta dengan polarisasi minimize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa surat penyampaian nilai LHP BPK dari BRSDM KP. IKK ini merupakan Indikator Kinerja Mandatory (IKM).

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target $\leq 0,5\%$ (kurang dari sama dengan nol koma lima persen). Capaian IKK Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%) tersaji pada tabel berikut.

Tabel 13 Capaian IKK 2-Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%)

IKK 2-Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%)								
Realisasi			Tahun 2023			% Kenaikan 2022-2023	Renstra Pusrisikan 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
0	0	0	$\leq 0,5$	0	120,00	-	≤ 1	100,00

Pada tahun ini, IKU Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan tercapai 0,00% atau selama Tahun 2023 ini Pusrisikan tidak didapati temuan LHP BPK atas Laporan Keuangannya. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian IKK ini tidak mengalami peningkatan

ataupun penurunan capaian. Dalam rencana jangka menengah 2020–2024, target IKU ini ditetapkan sebesar $\leq 1\%$ setiap tahun (stabilized), begitu juga pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan target 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka kondisi capaian akan sama dengan kondisi tahun ini.

BPPSDM KP memiliki 5 (lima) unit Eselon II dengan 2 (dua) DIPA, terdiri dari DIPA Gambir (Sekretariat BRSDM, Pusdik KP, Puslatluh KP) dan DIPA Ancol (Pusriskan dan Pusriskel). Jika dibandingkan capaiannya, keduanya sama-sama tidak memiliki temuan sehingga dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 14 Perbandingan capaian Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK–RI atas LK Pusat Riset Perikanan Eselon II lainnya

No	Kode	Nama Satker	Total		Temuan Nilai Kepatuhan	Nilai IKU (Temuan/Realisasi)	Ket
			Pagu	Real			
1	403821	Pusat Riset Perikanan	37.720.785.000	37.261.765.391			$\leq 1\%$
2	626402	Sekretariat Badan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan	76.750.714.000	74.374.496.869			$\leq 1\%$

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini adanya penggunaan anggaran sesuai kaidah peraturan yang berlaku, serta komitmen pimpinan dalam memantau proses administrasi keuangan sampai dengan evaluasi laporan keuangan Pusriskan.

Kegiatan pendukung tercapainya kegiatan ini adalah pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala. Sehingga tidak adanya temuan dari hasil penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan (LK) Lingkup Pusat Riset Perikanan. Sesuai dengan Surat Nomor B.6509/BRSDM.1/HP.520/X/2023 a.n. Kepala BRSDM, Sekretaris BRSDM tanggal 13 Oktober 2023 tentang Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan manajemen keuangan dengan anggaran sebesar Rp.596.586.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.587.196.750 (98,43%). Jika dibandingkan

dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120,00% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 21,57%.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023.

Indikator ini diperoleh dari nilai yang diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan metode cascading buat baru serta dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode semesteran, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa surat hasil pengukuran IP ASN dari BRSDM KP dan nilainya dapat diakses melalui <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023>. IKK ini merupakan Indikator Kinerja Mandatory (IKM).

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target 78 (tujuh puluh delapan) indeks profesional ASN Pusat Riset Perikanan. Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks) tersaji pada tabel berikut.

Tabel 15 Capaian IKK 3–Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)

IKK 3–Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)								
Realisasi			Tahun 2023			% Kenaikan 2022–2023	Renstra Pusrisikan 2020–2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
80,10	78,67	82,02	78	90,77	116,37	10,67	76	119,43

Pada tahun ini, IKK Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan tercapai nilai 90,77 dari target nilai 78 atau tercapai 116,37%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian IKU ini mengalami peningkatan capaian sebesar 10,67%. Sampai dengan Tahun 2023 ini, capaian Indeks Profesional ASN Pusat Riset Perikanan telah tercapai 119,43% dari target rencana strategis senilai 76 Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan pada Tahun 2024. Target renstra indikator kinerja ini lebih kecil dari target tahun 2023 dipengaruhi oleh dilakukan penyesuaian target jangka menengah Pusrisikan terhadap penyesuaian kebijakan perubahan target tahun berjalan. Berikut merupakan nilai Indeks Profesional ASN Pusrisikan.

Tabel 16 Rincian Nilai IP ASN Pusat Riset Perikanan Tahun 2023

	Dimensi				Total	Ket
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
Bobot	25	40	30	5	100	
IP	21,04	39,85	25	5	90,77	Tinggi

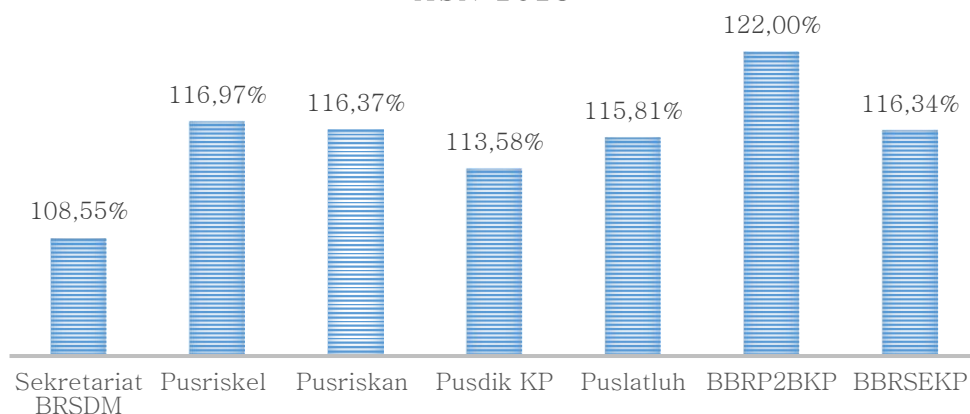
Sebagaimana tertuang dalam surat a.n. Kepala BPPSDM, Sekretaris BRSDM Nomor B.22/BPPSDM.1/TU.210/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Capaian IP ASN Tahun 2023. IKK ini diterapkan diseluruh unit eselon II maka capaian kinerja Pusrisikan dalam penilaian indeks profesionalisme Tahun 2023 dapat dibandingkan dengan unit Eselon II lainnya. Jika dibandingkan dengan persentase capaian unit Eselon II lain lingkup BRSDM KP, Pusrisikan mencapai urutan ketiga dari tujuh unit Eselon II di BPPSDMKP. Perbandingan persentase

capaian nilai indeks profesionalisme unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 17 Perbandingan Nilai IP ASN Pusat Riset Perikanan Tahun 2023 dengan Eselon II Lainnya

	Sekretariat BRSDM	Pusriskel	Pusriskan	Pusdik KP	Puslatluh	BBRP2BKP	BBRSEKP
Target	81	78	78	79	77	75	75
Realisasi	87.93	91.24	90,77	89.73	89.18	91.5	87.26
%	108,55	116,97	116,37	113,58	115,81	122,00	116,34

Perbandingan % Capaian Indeks Profesionalitas ASN 2023



Gambar 8 Perbandingan Persentase Capaian Indeks Profesionalitas ASN unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023

Faktor tercapainya IKK ini merupakan hasil pengembangan sumberdaya manusia Pusat Riset Perikanan. Dengan aktifnya pegawai Pusriskan dalam mengikuti diklat maupun seminar dan kegiatan terkait dengan kompetensinya sehingga dapat meningkat nilai kompetensi pegawai Pusriskan. Peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar. Peningkatan kompetensi melalui pengembangan SDM pada masing-masing bidang keahliannya. Peningkatan kinerja dapat berupa Nilai SKP Pegawai KKP yang diharapkan selalu meningkat. Peningkatan disiplin dapat dilihat persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan pada data hukuman disiplin apabila ada.

Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain dukungan seluruh pegawai di lingkup Pusat Riset Perikanan dan pengelola kepegawaian. Untuk mendapatkan data-data terkini, masing-masing pegawai dapat mengunggah dokumen bukti diklat-diklat yang diikuti dan melakukan entri data diklat atau seminar yang diikuti, atau menyerahkan kepada pengelola kepegawaian sehingga nilai kompetensi pegawai dapat sesuai.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan manajemen SDM dengan anggaran sebesar Rp.549.009.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.539.689.350 (98,30%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 116,37% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 18,07%.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4

Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai)

Nilai Mandiri SAKIP Level II BRSDM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP unit level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di unit Eselon II Lingkup BRSDM.

Nilai Mandiri SAKIP level II lingkup BRSDM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BRSDM. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan metode cascading buat baru serta dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik itjen dan hasil penilaian mandiri satker dan hasil verifikasi Tim SAKIP BRSDM. IKK ini merupakan Indikator Kinerja Mandatory (IKM).

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target 76 (tujuh puluh enam) nilai mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan. Capaian IKK Nilai Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai) tersaji pada tabel berikut.

Tabel 18 Capaian IKK 4-Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai)

IKK 4-Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai)								
Realisasi			Tahun 2023			% Kenaikan 2022-2023	Renstra Pusrisikan 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
-	-	-	76	80,90	106,45	-	-	-

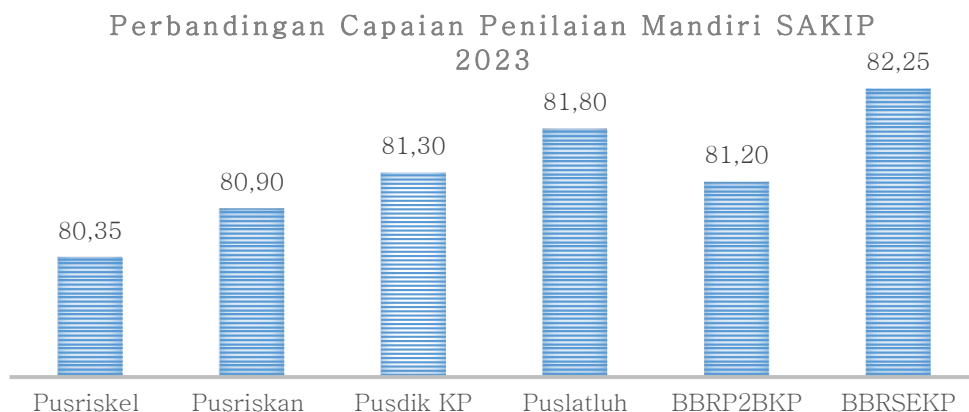
*IKK Baru

Pada Tahun 2023 ini, IKK Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan telah tercapai sebesar 80.90 (nilai) dari target Tahun 2023 sebesar 76 (tujuh puluh enam) atau terealisasi 106,45%, Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada tahun ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam rencana jangka menengah 2020-2024, target IKK ini juga belum ditetapkan karena merupakan IKK baru yang dapat dibandingkan pada akhir tahun.

Sebagaimana tertuang dalam surat a.n. Kepala BRSDM, Sekretaris BRSDM Nomor B.3352/BRSDM.1/RC.510/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level 2 lingkup BRSDM. IKK ini diterapkan diseluruh unit eselon II maka capaian kinerja Pusrisikan dalam penilaian mandiri SAKIP Tahun 2023 dapat dibandingkan dengan unit Eselon II lainnya. Jika dibandingkan dengan persentase capaian unit Eselon II lain lingkup BPPSDM KP, Pusrisikan mencapai urutan kedua dari enam unit Eselon II di BPPSDM KP, namun pencapaian nilai kelima dari enam unit Eselon II lain lingkup BPPSDM KP. Perbandingan capaian penilaian mandiri SAKIP unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 19 Perbandingan IKK Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai) dengan Eselon II Lainnya

	Pusriskel	Pusriskan	PusdikKP	Puslatluh	BBRP2BKP	BBRSEKP
Target	75,00	76,00	80,00	80,00	80,50	80,50
Realisasi	80,35	80,90	81,30	81,80	81,20	82,25
%	107,13	106,44	101,62	102,25	100,87	102,17



Gambar 9 Perbandingan Capaian Penilaian Mandiri SAKIP unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023

Faktor tercapainya IKK ini adalah tersedianya dokumen pendukung penilaian mandiri SAKIP tahun 2023 pada aplikasi DSMS SAKIP. Dokumen yang dimaksud antara lain dokumen perencanaan kinerja, dokumen pengukuran kinerja, dokumen pelaporan kinerja, dan dokujmen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Selain itu, didukung pula komitmen pimpinan dalam mengupayakan kelengkapan dokumen yang dimaksud agar tercapai sesuai target yang diharapkan.

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKK ini pada capaian akhir Tahun 2023 adalah terlaksananya kegiatan bimtek dan pendampingan pengukuran dan penilaian mandiri yang oleh Sekretariat BRSDM. Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023 telah dilaksanakan penilaian mandiri SAKIP pada satker Lingkup Pusat Riset Perikanan, termasuk penilaian mandiri terhadap Pusat Riset Perikanan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan pelayanan perencanaan dan penganggaran internal riset perikanan, pelayanan monitoring dan evaluasi riset perikanan, pelayanan pelaporan kinerja

riset perikanan dengan anggaran sebesar Rp.527.452.500 dan telah terealisasi sebesar Rp.521.424.248 (98,86%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 106,45% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,59%.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)

Rekonsiliasi kinerja Pusat Riset Perikanan adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Pusat Riset Perikanan. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja Pusat Riset Perikanan, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II Setjen untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik.

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. Nilai Rekonsiliasi Kinerja berdasarkan Nilai Aspek Kepatuhan, Nilai Aspek Kesesuaian, Nilai Aspek Ketercapaian, Nilai Aspek Ketepatan. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan metode cascading buat baru serta dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja lingkup Pusrisikan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa surat penyampaian hasil rekonsiliasi kinerja dari BRSDM KP dan Kertas Kerja Rekonsiliasi Kinerja yang ditandatangani oleh Pembahas dan Kepala Pusat Riset Perikanan. IKK ini merupakan Indikator Kinerja Mandatory (IKM).

Pada Tahun 2023 ini Pusat Riset Perikanan memiliki target nilai rekonsiliasi kinerja sebesar 93 (sembilan puluh tiga). Berikut merupakan capaian nilai rekonsiliasi kinerja Pusat Riset Perikanan:

Tabel 20 Capaian IKK 5–Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)

IKK 5–Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)								
Realisasi			Tahun 2023			% Kenaikan 2022–2023	Renstra Pusrisikan 2020–2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
–	89,61	97,72	93	97,33	104,66	–0,39	80,75	120,00

Pada tahun ini, IKK Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan tercapai nilai 97,33 dari target nilai 93 atau tercapai 104,66%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian IKK ini mengalami sedikit penurunan capaian 0,39% sampai dengan Tahun 2023 ini. Penurunan ini diakibatkan oleh adanya perbedaan angka realisasi LKj Triwulan III Tahun 2023 dengan Aplikasi kinerjaku dan Data dukung capaiannya. Sehingga kedepan diperlukan langkah antisipasi yaitu dengan verifikasi realisasi capaian kinerja antara aplikasi kinerjaku, laporan kinerja dan data dukung yang diperoleh. Namun, capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan telah tercapai 120,53% dari target rencana strategis senilai 80,75 nilai rekonsiliasi kinerja Pusat Riset Perikanan pada Tahun 2024. Target renstra indikator kinerja ini lebih kecil dari target tahun 2023 dipengaruhi oleh dilakukan penyesuaian target jangka menengah Pusrisikan terhadap penyesuaian kebijakan perubahan target tahun berjalan. Berikut merupakan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusrisikan.

Tabel 21 Rincian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Puriskan Tahun 2023

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	98,96	99,07	111,30	100,00
Skor dikali Bobot	24,74	24,77	27,83	20,00
Total Skor	97,33			

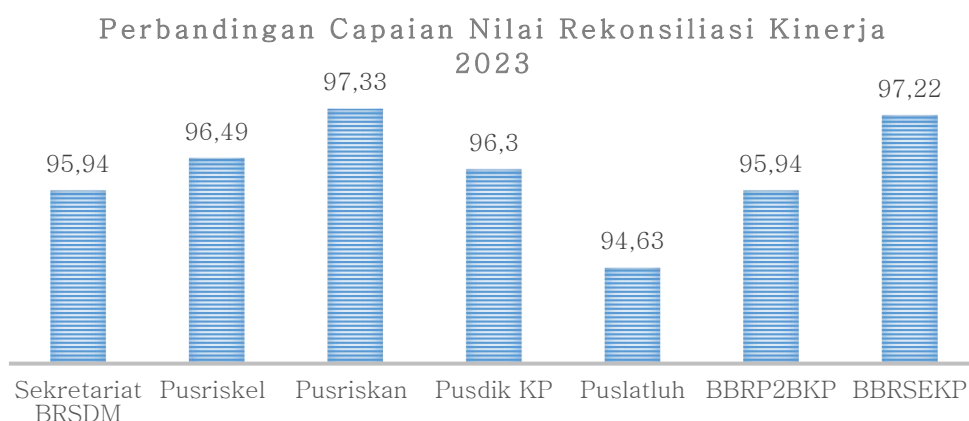
Berdasarkan Surat a.n Kepala BPPSDM, Sekertaris BRSDM Nomor B.7354/BPPSDM.1/RC.510/XI/2023 tentang Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Kinerja Level II di Lingkungan BPPSDM Tahun 2023

tanggal 24 November 2023 nilai rekonsiliasi kinerja Pusat Riset Perikanan sebesar 97,33. Hanya aspek ketepatan yang mendapatkan nilai 100. Hal ini disebabkan ada perbedaan diantara data dukung, narasi LKj Triwulan III Tahun 2023 dengan narasi aplikasi Kinerja yang merupakan nilai pencapaian sasaran strategis dari rata-rata Triwulan I sampai dengan Triwulan III.

Sebagaimana IKK ini diterapkan diseluruh unit eselon II maka capaian kinerja Pusrisikan dalam penilaian rekonsiliasi kinerja Tahun 2023 dapat dibandingkan dengan unit Eselon II lainnya. Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain lingkup BPPSDM KP, Pusrisikan mencapai urutan pertama dari tujuh unit Eselon II di BPPSDM KP. Namun secara persentase capaian berada di urutan ketiga dari tujuh unit eselon II di BPPSDM KP. Capaian nilai rekonsiliasi kinerja unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 22 Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Puriskan Tahun 2023 dengan Eselon II Lainnya

	Sekretariat BRSDM	Pusriskel	Pusriskan	PusdikKP	Puslatluh	BBRP2BKP	BBRSEKP
Target	93	93	93	93	93	93	93
Realisasi	95,94	96,49	97,33	96,30	94,63	95,94	97,22
%	103,16	103,75	104,65	103,54	101,75	103,16	104,53



Gambar 10 Perbandingan Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023

Pada Tahun 2023, faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini dapat tercapai karena diperolehnya dokumen yang mendukung aspek-aspek penilaian nilai rekonsiliasi kinerja Pusrisikan. Dokumen tersebut menunjang pengukuran rekonsiliasi kinerja selesai melakukan perhitungan dengan instrument Kertas Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 aspek, sebagai berikut 1) Aspek Kepatuhan (bobot 25%), yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja: (a) Perjanjian Kinerja; (b) Manual Indikator Kinerja; (c) Rincian Target Indikator; (d) Laporan Kinerja; (e) Data Dukung Laporan Kinerja. 2) Aspek Kesesuaian (bobot 25%), yaitu evaluasi kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerjaku antara lain a) Kesesuaian Target Kinerja (Perjanjian Kinerja – Laporan Kinerja/LCK – Aplikasi kinerjaku), b) Kesesuaian Realisasi Kinerja (Laporan Kinerja/LCK – Aplikasi kinerjaku), c) Kesesuaian pada Sistem Aplikasi (Manual IKU – Rincian Target IKU – Aplikasi kinerjaku). 3) Aspek Ketercapaian (bobot 30%), diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Aplikasi kinerjaku. 4) Aspek Ketepatan (bobot 20%), diukur dari ketepatan waktu pelaporan atas LKJ ke atasan, dan Pelaporan dokumen ke aplikasi e-Sakip Reviu. Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. Nilai Rekonsiliasi Kinerja = $(25\% \times \text{Nilai Aspek Kepatuhan}) + (25\% \times \text{Nilai Aspek Kesesuaian}) + (30\% \times \text{Nilai Aspek Ketercapaian}) + (20\% \times \text{Nilai Aspek Ketepatan})$.

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKK ini adalah terlaksananya kegiatan ataupun oleh selesainya penilaian yang dilakukan oleh Sekretariat BRSDM dan Eselon II lainnya di Lingkungan BPPSDM KP. Kegiatan pelaksanaan dokumen perencanaan hingga pelaksanaan dokumen monitoring hingga dokumen pelaporan kinerja yang dilakukan dengan baik. Setiap aspek dilakukan monitoring terhadap dokumen-dokumen secara berkala.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan dengan anggaran sebesar Rp.378.068.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.359.370.955 (95,05%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 104,66% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 9,61%.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6

Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di lingkup KKP pada Triwulan I dan II Tahun 2023 menggunakan aplikasi kinerjakkp.bitrix24.com. Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Bitrix24. Komponen Dokumen yang diunggah pada aplikasi bitrix24 diantaranya Laporan Kinerja per triwulan. Bobot Komponen Keaktifan diantaranya Bobot Komponen Keaktifan diantaranya : Konten dokumentasi tulisan kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5; Konten berupa karya infografis poin 1; Konten berupa jurnal/video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.

Pada Triwulan III* dan IV Tahun 2023 perhitungan indikator Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di lingkup UPT BRSDM Menggunakan Aplikasi (*collaboration office*) dengan alamat portal.kkp.go.id; Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap satu triwulan dengan komposisi mendapatkan 4 poin. Bobot nilai keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan sama dengan di TW I dan II.

Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan metode cascading buat baru serta dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode triwulanan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusrisikan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa

surat capaian indikator kinerja manajemen pengetahuan dari BRSDM KP. IKK ini merupakan Indikator Kinerja Mandatory (IKM).

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target 92% (sembilan puluh dua persen) unit kerja Pusat Riset Perikanan yang menerapkan sistem pengetahuan terstandar. Capaian IKK Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar tersaji pada tabel berikut.

Tabel 23 Capaian IKK6–Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

IKK 6–Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)								
Realisasi			Tahun 2023			% Kenaikan 2022–2023	Renstra Pusrisikan 2020–2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
82	92,71	99,88	92	116,58	120,00	16,72	90	129,53

Pada Tahun 2023 ini, IKK Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar telah tercapai sebesar 116,58% dari target Tahun 2023 sebesar 92% atau terealisasi 126,72%, karena pada aplikasi kinerjaku nilai toleransi maksimal adalah 120,00% sehingga persentase capaiannya adalah 120,00%. Capaian ini mengalami kenaikan capaian sebesar 16,72% dari Tahun sebelumnya, hal ini disebabkan keaktifan yang lebih baik selain itu dilakukan penyesuaian penggunaan aplikasi yang pada triwulan sebelumnya melalui bitrix23 sedangkan mulai Triwulan III Tahun 2023 ini sudah menggunakan *platform Portal Collaboration Office* (portal.kkp.go.id). Sesuai dengan Surat Nomor B.90/BPPSDM.1/TU.210/I/2024 a.n. Kepala BPPSDM, Sekretaris BRSDM perihal Capaian Nilai Akhir IKU MP Terstandar Lingkup KKP tanggal 3 Januari 2024.

Dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 dengan target 90, maka capaian Tahun 2023 telah melampaui capaian hingga 129,53%. Target renstra indikator kinerja ini lebih kecil dari target tahun 2023 dipengaruhi oleh dilakukan penyesuaian target jangka

menengah Pusrisikan terhadap penyesuaian kebijakan perubahan target tahun berjalan. Berikut merupakan nilai tingkat penerapan manajemen pengetahuan Pusat Riset Perikanan Tahun 2023:

Tabel 24 Perhitungan Penerapan Manajemen Pengetahuan Pusat Riset Perikanan Tahun 2023

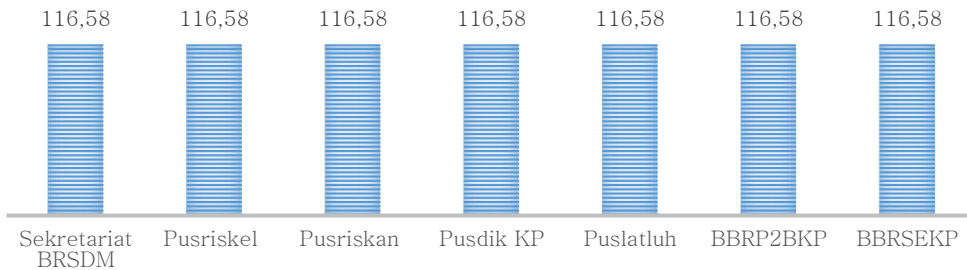
Keaktifan			
Level 2	Target Keaktifan	Capaian (Aktif)	%
Kepala Pusrisikan	3	4	133,33%
Ketua Tim Kelompok Kerja	12	16	133,33%
Rata-rata			133,33%
Realisasi TW I			100,00%
Realisasi TW II			100,00%
Realisasi TW III			133,00%
Realisasi TW IV			133,33%
Nilai Rata-rata Tahun 2023			116,58%

Sebagaimana IKK ini diterapkan diseluruh unit eselon II maka capaian kinerja Pusrisikan dalam penerapan manajemen pengetahuan Tahun 2023 dapat dibandingkan dengan unit Eselon II lainnya. Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain lingkup BPPSDM KP, Pusrisikan beserta unit Eselon II di BPPSDM KP lainnya di BPPSDM KP memiliki nilai yang sama 116,58% dengan persentase capaian yang sama sebesar 120,00%. Capaian penerapan Manajemen Pengetahuan unit Eselon II lingkup BRSDM KP Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 25 Perbandingan IKK Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) dengan Eselon II Lainnya

	Sekretariat BRSDM	Pusriskel	Pusrisikan	PusdikKP	Puslatluh	BBRP2BKP	BBRSEKP
Target	92	92	92	92	92	92	92
Realisasi	116,58	116,58	116,58	116,58	116,58	116,58	116,58
%	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Perbandingan Capaian Penerapan Manajemen Pengetahuan 2023



Gambar 11 Perbandingan Capaian Penerapan Manajemen Pengetahuan unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023

Pada Tahun 2023, faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini disebabkan oleh tersedianya aplikasi Bitrix dan *platform Portal Collaboration Office* (portal.kkp.go.id) yang mudah diakses. Selain itu, ketersediaannya dokumen yang diperlukan seperti renstra, perjanjian kinerja setiap perubahannya, laporan kinerja setiap triwulannya pada aplikasi Bitrix. Keaktifan yang setiap koordinator/ketua tim kerja dalam menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar ini.

Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain terlaksananya kegiatan-kegiatan positif yang dapat dibagikan di aplikasi Bitrix sebagai sarana manajemen pengetahuan terstandar dan pada triwulan III tahun 2023 menggunakan *platform Portal Collaboration Office* (portal.kkp.go.id). Dilakukan pula monitoring dan evaluasi setiap bulannya, baik dari segi dokumen maupun keaktifannya agar lebih efektif lagi dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan sarana teknologi informasi dan komunikasi bidang riset dan SDM KP, layanan data dan informasi, layanan hubungan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.437.880.500 dan telah terealisasi sebesar Rp.432.501.885 (98,77%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 21,23%.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%)

Rekomendasi hasil pengawasan diperoleh dari persentase jumlah rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti berdasarkan total rekomendasi yang diperoleh. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan IKK dengan metode cascading buat baru serta dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode triwulanan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa surat capaian indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi dari BRSDM KP. IKK ini merupakan Indikator Kinerja Mandatory (IKM).

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target 80% (delapan puluh persen) rekomendasi hasil pengawasan yang telah dilengkapi dan disampaikan. Capaian IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 26 Capaian IKK 7–Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%)

IKK 7–Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%)								
Realisasi			Tahun 2023			% Kenaikan 2022–2023	Renstra Pusrisikan 2020–2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
100	94,96	100	80	100	120,00	–	80	120,00

Pada Tahun 2023, target IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan ini ditetapkan sebesar 80%. Mengacu kepada Surat a.n. Kepala BPPSDM, Sekretaris BRSDM Nomor : B.292/BPPSDM.1/RC.610/I/2024 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk

Perbaikan Kinerja Lingkup BPPSDM KP” Triwulan IV Tahun 2023, tanggal 14 Januari 2024. Hasil pengukuran sampai dengan Triwulan III, Pusrisikan terdapat 1 (satu) temuan awal dan sudah ditindaklanjuti sehingga nilai capaian IKM ini mencapai nilai 100,00% dari target 80% atau 125,00%, karena pada aplikasi kinerjaku nilai toleransi maksimal adalah 120,00% sehingga persentase capaiannya adalah 120,00%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya memiliki nilai capaian yang sama, capaian indikator ini mengalami peningkatan atau penurunan bergantung pada ada atau tidaknya temuan dan kecepatan tindaklanjut terhadap temuan. Dalam rencana jangka menengah 2020–2024, target IKK ini ditetapkan sebesar 80, jika dibandingkan dengan realisasi 2023 ini telah tercapai sebesar 120,00%.

Capaian IKK diperoleh dari Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon II lingkup BRSDM. Seperti disampaikan bahwa Pusrisikan terdapat 1 (satu) temuan, BBRBLPP Gondol terdapat 2 (dua) temuan, BRPBAPPP Maros terdapat 15 (lima belas) temuan, BRPI Sukamandi terdapat 5 (lima) temuan dan sudah ditindaklanjuti temuannya. Berikut rincian persentase tindaklanjut temuan itjen dilingkup Pusrisikan.

Tabel 27 Data Rekapitulasi persentase rekomendasi hasil pengawasan Pusrisikan

No	Satker Pusat/UPT	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	Pusrisikan, Ancol	1	1	100,00
2	BBRBLPP, Gondol	2	2	100,00
3	BRPBAPPP, Maros	15	15	100,00
4	BRPI, Sukamandi	5	5	100,00
Total		23	23	100,00

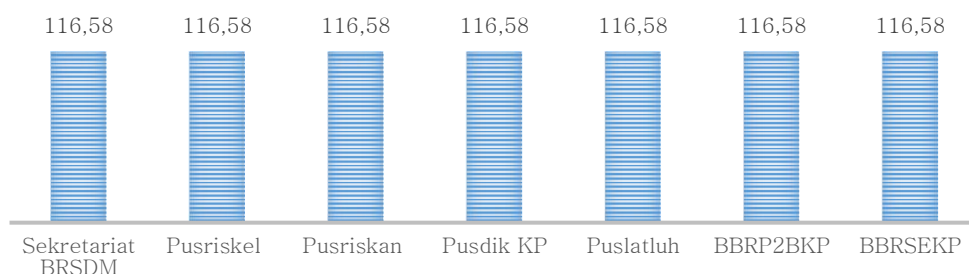
Sebagaimana IKK ini diterapkan diseluruh unit eselon II maka capaian kinerja Pusrisikan dalam persentase rekomendasi hasil pengawasan Tahun 2023 dapat dibandingkan dengan unit Eselon II lainnya. Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain lingkup BPPSDM KP, Pusrisikan dan Pusdik KP memiliki nilai yang sama 100,00% dengan

persentase capaian yang sama sebesar 120,00%. Selain dua satuan kerja ini dan Sekretariat BRSDM tidak memiliki temuan. Capaian penerapan Manajemen Pengetahuan unit Eselon II lingkup BRSDM KP Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 28 Perbandingan IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya

	Sekretariat BRSDM	Pusriskel	Pusriskan	PusdikKP	Puslatluh	BBRP2BKP	BBRSEKP
Target	80	80	80	80	80	80	80
Realisasi	80,95	80	100,00	100,00	80	80	80
%	101,18	100,00	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00

Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan 2023



Gambar 12 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%)

Faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain terlaksananya administrasi keuangan dan perbendaharaan yang baik. Sertaantisipasi permasalahan atau adanya kesalahan dalam administrasi. terselesaikannya dokumen tindaklanjut yang baik dengan koordinasi yang baik.

Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja ini dipengaruhi oleh terselesaikannya tindaklanjut hasil pengawasan yang dikerjakan, komitmen pimpinan Bersama tim keuangan maupun perbendaharaan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam proses administrasi keuangan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan pelayanan monitoring dan evaluasi riset perikanan dan layanan umum dengan

anggaran sebesar Rp.534.469.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.527.056.983 (98,61%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120,00% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 21,39%.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 8

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran diperoleh dari konversi nilai indikator dan bobot indikatornya, terdapat 8 (delapan) indikator antara lain revisi DIPA, deviasi RDP, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian output. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan metode cascading buat baru serta dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode semesteran, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa surat capaian indikator kinerja IKPA dari Biro Keuangan. IKK ini merupakan Indikator Kinerja Mandatory (IKM).

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan dengan target nilai 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima). Capaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 29 Capaian IKK 8–Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)

IKK 8–Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)								
Realisasi			Tahun 2023			% Kenaikan 2022–2023	Renstra Pusrisikan 2020–2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
95,60	87,73	91,37	93,75	90,98	97,05	-0,42	90	101,08

Pada Tahun 2023 ini, IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan ditetapkan senilai 93,75 dan dilakukan pengukuran secara Semesteran dengan target Tahunannya juga senilai 93,75. Mengacu kepada Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 100/SJ.2/TU.210/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2023, hasil pengukuran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023, nilai capaian IKK ini mencapai nilai 90,98 atau 97,05% dari target nilai 93,75. Capaian ini mengalami penurunan capaian sebesar 0,42%. dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan penurunan nilai indikator penyerapan dipengaruhi oleh rata-rata realisasi disetiap triwulannya.

Sehingga kedepan diperlukan langkah antisipasi yaitu dengan pemantauan realisasi terhadap target anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun. Dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 dengan target 90, maka capaian Tahun 2023 telah melampaui capaian hingga 101,08%. Target renstra indikator kinerja ini lebih kecil dari target tahun 2023 dipengaruhi oleh dilakukan penyesuaian target jangka menengah Pusrisikan terhadap penyesuaian kebijakan perubahan target tahun berjalan. Rincian nilai dari beberapa aspek pendukung nilai kinerja pelaksanaan anggaran antara lain :

Tabel 30 Rincian nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pusrisikan Tahun 2023

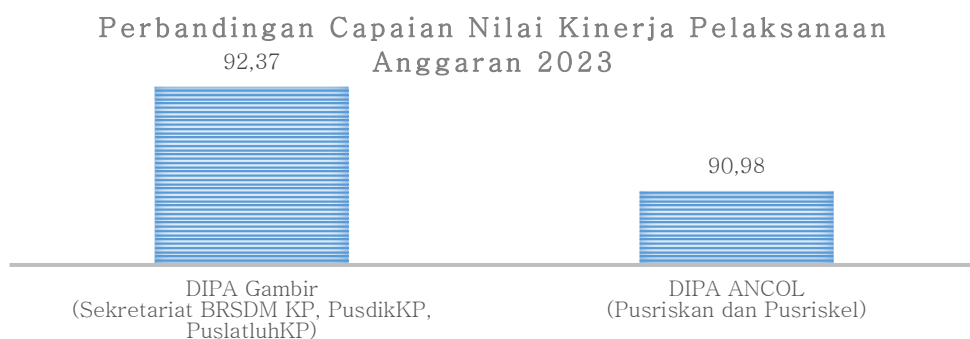
Uraian Satker	Aspek			Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			
PUSAT RISET PERIKANAN	85,11	92,52	100,00	90,98	100%	90,98

Faktor penyebab tidak tercapainya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan ini dipengaruhi oleh adanya blokir anggaran dan baru adanya kebijakan buka blokir pada Triwulan IV Tahun 2023 membuat nilai kualitas perencanaan yang kecil. Telah dilakukan revisi target POK untuk menyesuaikan kembali rencana kegiatan pelaksanaan anggaran namun masih belum dapat meningkatkan nilai aspek kualitas perencanaan yang baik. Selain itu, berpengaruh pula terhadap indikator penyerapan pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran yang rendah akibat target rencana penarikan dana awal yang tinggi di setiap triwulan tidak melihat kondisi anggaran blokir yang besar diawal tahun. Walaupun tidak tercapai indikator ini terhadap target, namun indikator kinerja pada aplikasi kinerjajaku masih dalam kategori hijau.

Sebagaimana IKK ini diterapkan diseluruh unit eselon II maka capaian kinerja Pusrisikan dalam kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2023 dapat dibandingkan dengan unit Eselon II lainnya. BPPSDM KP memiliki 5 (lima) unit Eselon II dengan 2 (dua) DIPA, terdiri dari DIPA Gambir (Sekretariat BRSDM, Pusdik KP, Puslatluh KP) dan DIPA Ancol (Pusrisikan dan Pusriskel). Jika dibandingkan capaiannya, DIPA Gambir memiliki capaian nilai kinerja anggaran yang lebih baik dari pada DIPA Ancol. Capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 31 Perbandingan IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai) dengan Eselon II Lainnya

	Sekretariat BRSDM	Pusriskan
Target	93,75	93,75
Realisasi	92,37	90,98
%	98,52	97,04



Gambar 13 Perbandingan capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023

Kegiatan pendukung pencapaian nilai indikator ini antara lain dipengaruhi oleh koordinasi dari penanggung jawab kegiatan dengan tim keuangan Pusriskan yang selalu baik. Dengan adanya penyesuaian administrasi keuangan maupun penyesuaian rencana penarikan dana, yang mempengaruhi waktu terlaksananya kegiatan. Pada Tahun ini masih berlaku kebijakan satu dipa sehingga Pusriskan dan Pusriskel menggunakan akun yang sama, namun masih dapat melaksanakan pengadministrasian dengan baik walaupun masih terdapat kesalahan-kesalahan sehingga nilai kinerja pelaksanaan anggaran tidak optimal.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Pelayanan Keuangan Riset Perikanan dengan anggaran sebesar Rp.6.084.369.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.6.033.790.360 (99,17%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 97,05% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar -2,12%.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 9

Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan metode cascading buat baru serta dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa nota dinas dari Biro Keuangan atau tangkapan layar Aplikasi Smart DJA Kemenkeu. IKK ini merupakan Indikator Kinerja Mandatory (IKM).

Pada Tahun 2023 ini Pusat Riset Perikanan memiliki target 82 (delapan puluh dua) nilai kinerja anggaran Pusat Riset Perikanan. Berikut merupakan capaian nilai kinerja anggaran (NKA) Pusat Riset Perikanan :

Tabel 32 Capaian IKK 9-Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)

IKK 9-Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)								
Realisasi			Tahun 2023			% Kenaikan 2022-2023	Renstra Pusrisikan 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
83,56	85,59	83,13	82	85,96	104,83	3,40	89	96,58

Pada Tahun 2023, target IKK Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan ini ditetapkan senilai 82 dan dilakukan pengukuran secara Tahunan dengan target Tahunannya senilai 82. Mengacu kepada Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 84/SJ.2/RC.610/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

(KKP) Triwulan IV Tahun 2023. Hasil pengukuran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023, nilai capaian IKK ini mencapai nilai 85,96 atau 104,83% dari target nilai 82. Capaian ini mengalami peningkatan capaian sebesar 3,40%, hal ini disebabkan telah dilakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada setiap triwulannya, hal ini menyebabkan nilai konsistensi NKA Pusrisikan lebih baik dari tahun sebelumnya yang mempengaruhi nilai kinerja secara keseluruhan. Dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 dengan target 89, maka capaian Tahun 2023 telah mencapai 96,58%. Adapun rincian nilai kinerja anggaran Pusat Riset Perikanan antara lain :

Tabel 33 Rincian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan

Uraian Satker	Aspek Implementasi					Nilai NKA
	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai Efisiensi	
PUSAT RISET PERIKANAN	98,81	97,41	100	1,19	52,97	85,96

Dapat dilihat dari tabel diatas nilai kinerja anggaran Pusrisikan dengan nilai aspek implementasi tertinggi pada capaian keluaran, dan dengan nilai terendah dengan aspek nilai efisiensi. Dimana nilai efisiensi diambil dari aspek efisiesi yang juga rendah serta akumulasi dari kekonsistensian dalam penyerapan anggaran terhadap perencanaan yang rendah pula. Sehingga pada tahun ini memiliki nilai kinerja anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

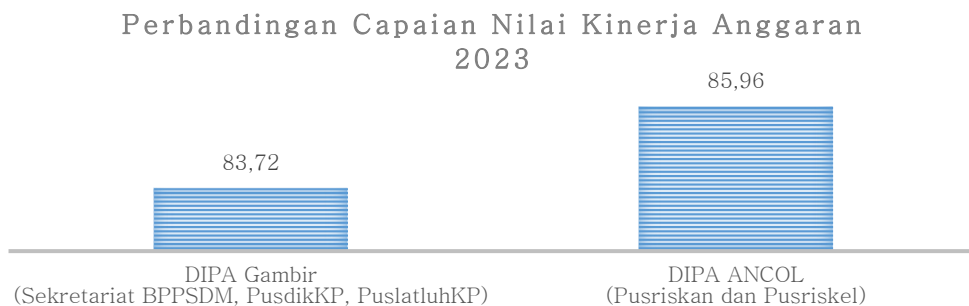
Sejak Tahun 2021 dikembangkan dengan adanya RSPP dan berfokus pada capaian output dari aplikasi SAKTI yang telah diupload pada aplikasi Omspan. Sehingga tercapainya indikator kinerja ini dipengaruhi oleh tepat waktunya pengisian capaian kinerja bulanan pada aplikasi SAKTI. Nilai kinerja anggaran memiliki banyak faktor seperti capaian rincian output, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dan penyerapan anggaran.

Sebagaimana IKK ini diterapkan diseluruh unit eselon II maka capaian kinerja Pusrisikan dalam nilai kinerja anggaran Tahun 2023 dapat dibandingkan dengan unit Eselon II lainnya. BPPSDM KP memiliki

5 (lima) unit Eselon II dengan 2 (dua) DIPA, terdiri dari DIPA Gambir (Sekretariat BRSDM, Pusdik KP, Puslatluh KP) dan DIPA Ancol (Pusriskan dan Pusriskel). Jika dibandingkan capaiannya, DIPA Ancol memiliki capaian nilai kinerja anggaran yang lebih baik dari pada DIPA Gambir baik secara nilai capaian maupun persentase capaian. Capaian nilai kinerja anggaran unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 34 Perbandingan IKK Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai) dengan Eselon II Lainnya

	Sekretariat BRSDM	Pusriskan
Target	82	82
Realisasi	83,72	85,96
%	102,09	104,82



Gambar 14 Perbandingan capaian nilai kinerja anggaran unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Tahun 2023

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah tingginya penyerapan anggaran, tercapainya output kegiatan yang ditargetkan, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan yang baik setelah dilakukan revisi POK. Selain itu, penanggung jawab indikator kinerja ini telah mengikuti bimtek aplikasi monitoring lingkup BRSDM Tahun 2023 dalam mengantisipasi penilaian kinerja anggaran.

Kegiatan pendukung tercapainya indikator ini antara lain dipengaruhi oleh koordinasi dari penanggung jawab kegiatan dengan tim monitoring dan evaluasi Pusriskan yang selalu baik. Pada setiap awal bulan dilakukan konsolidasi data untuk penginputan capaian output di Aplikasi SAKTI yang akan terintegrasi dengan Aplikasi Smart

DJA. Selain itu pada tahun ini dilakukan juga rekonsiliasi nilai kinerja anggaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat BRSDM. Sehingga nilai-nilai yang masih kurang dapat diantisipasi di akhir Tahun 2023.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan pelayanan monitoring dan evaluasi riset perikanan dalam moneyv dan capaian kinerja dengan anggaran sebesar Rp.20.697.744.500 dan telah terealisasi sebesar Rp.20.620.450.474 (99,63%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 104,83% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,20%.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 10

Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)

Kemitraan adalah suatu kerjasama formal yang saling menguntungkan antara Satuan Kerja lingkup Pusat Riset Perikanan dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan Pemanfaatan BMN Satuan Kerja Lingkup Pusat Riset Perikanan.

Indikator ini diperoleh dari jumlah kemitraan yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai psisi akhir dan merupakan ikk dengan metode cascading komponen pembentuk serta dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa naskah perjanjian kemitraan yang disepakati kedua belah pihak diantaranya, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama pemanfaatan BMN, perjanjian bangun guna serah, perjanjian kerjasama penyediaan infrastruktur, dan perjanjian pengembangan SDM. Bukti dukung tersebut juga dilengkapi dengan laporan kegiatan kemitraannya. IKK ini merupakan Indikator Kinerja Mandatory (IKM).

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target 30 (tiga puluh) dokumen kemitraan. Capaian IKK kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusrisikan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 35 Capaian IKK 10–Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)

IKK 10–Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)								
Realisasi			Tahun 2023			% Kenaikan 2022–2023	Renstra Pusrisikan 2020–2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
48	49	–	30	33	110,00	–	–	–

*IKK Baru

Pada Tahun 2023 ini, IKK Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan) belum memiliki target capaian. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang baru pada Tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta belum memiliki target jangka menengah 2020–2024. Namun pada tahun 2020 dan 2021 terdapat indikator kinerja jajarang/kerjasama yang disepakati dan/atau disepakati memiliki capaian yang lebih tinggi, karena masih memiliki kegiatan riset.

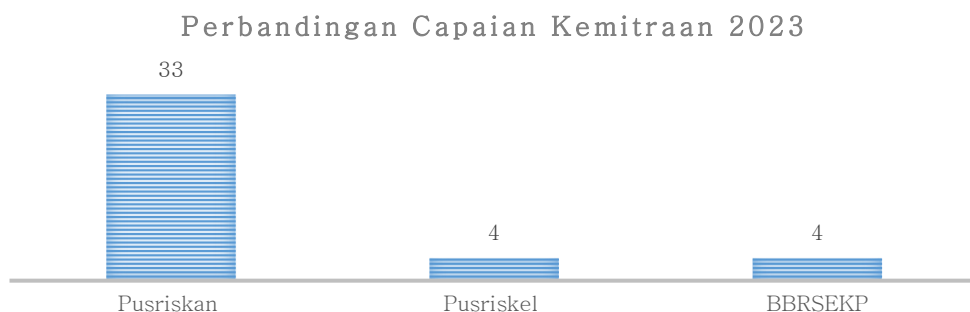
Kemitraan yang dihasilkan merupakan hasil penyelenggaraan kegiatan formal antara satuan kerja di lingkungan Pusrisikan dengan pihak mitra untuk melakukan aktivitas bersama yang saling menguntungkan dan untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Rekapitulasi kemitraan yang dihasilkan tersaji pada lampiran laporan ini.

Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain seperti Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) dan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) capaian kemitraan Pusrisikan lebih banyak dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lainnya. Namun secara persentase capaian masih dibawah Pusriskel maupun BBRSEKP. Karena dipengaruhi oleh satuan kerja lingkup Pusrisikan

yang lebih banyak. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 36 Perbandingan IKK Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan) dengan Eselon II Lainnya

	Pusriskan	Pusriskel	BBRSEKP
Target	30	3	3
Realisasi	33	4	4
%	110,00	120,00	120,00



Gambar 15 Perbandingan Capaian Kemitraan Tahun 2023 dengan Eselon II Lainnya

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah menyusun naskah kerja sama kesepakatan bersama antaran satuan kerja di lingkungan Pusriskan dengan pihak mitra untuk melakukan aktivitas bersama dan memiliki kesamaan prinsip bersama. Komitmen pimpinan dalam menjaling kemitraan dengan para mitra terkait pemanfaatan maupun optimalisasi lahan untuk mendukung kegiatan diseminasi maupun mendukung program kerja termasuk kegiatan smart fisheries village. Ruang lingkup kemitraan ini meliputi Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (BMN), Perjanjian Bangun Guna Serah, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Perjanjian Kerjasama di bidang pengembangan SDM KP, dll.

Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain terlaksananya kegiatan optimalisasi pemanfaatan aset untuk dilakukan sewa maupun penunjang kegiatan, salah satunya mendukung kegiatan

smart fisheries village. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatannya.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan pelayanan kerja sama riset perikanan dengan anggaran sebesar Rp.434.335.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.430.629.860 (99,15%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,85%.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 11

Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya Pusat Riset Perikanan (%)

Layanan dukungan manajemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Riset Perikanan berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan. Dokumen layanan dukungan manajemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerja sama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll.

Persentase dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang tersedia dibandingkan total dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan metode cascading buat baru serta dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode triwulanan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang tersedia dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan pengelolaan asset, kepegawaian,

berupa laporan, matriks, screenshoot aplikasi. IKK ini merupakan Indikator Kinerja Mandatory (IKM).

Pada Tahun 2023 ini Pusat Riset Perikanan memiliki target 100% (seratus persen) layanan dukungan manajemen internal Pusat Riset Perikanan. Berikut merupakan capaian Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Riset Perikanan :

Tabel 37 Capaian IKK11-Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%)

IKK 11-Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%)								
Realisasi			Tahun 2023			% Kenaikan 2022-2023	Renstra Pusrisikan 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
-	-	100	100	100	100,00	-	100	100,00

Pada Tahun 2023, target IKK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan ini ditetapkan 100,00% dan dilakukan pengukuran secara Triwulan dengan target Tahunannya juga sebesar 100,00%. Nilai capaian IKK ini mencapai 100,00% atau 100,00% dari target 100,00%. Capaian ini indikator kinerja ini stabil diangka 100,00% dari Tahun lalu sampai dengan Tahun 2023 ini. Dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 juga merupakan target yang stabil di angka 100,00% setiap tahunnya. Adapun rincian dokumen yang telah dihasilkan antara lain :

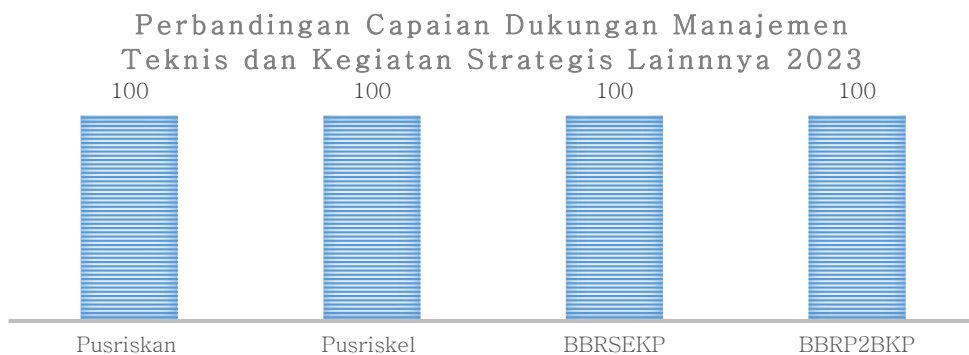
Tabel 38 Rincian Dokumen Manajemen Internal Pusat Riset Perikanan

No	Judul	Target 2023	Realisasi 2023	%
1	Mingguan	52	52	100%
2	Bulanan	12	12	100%
3	Triwulan	4	4	100%
4	Semester	2	2	100%
5	Tahunan	1	1	100%
6	Evaluasi Renaksi	4	4	100%
7	Laporan NKA	2	2	100%
8	Laporan Aplikasi Emonev Bappenas	4	4	100%
	Total	81	81	100%

Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain seperti Pusat Riset Kelautan (Pusriskel), Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP), dan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) capaian dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya memiliki capaian yang sama di setiap unit Eselon II lainnya. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 39 Perbandingan IKK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya

	Pusriskan	Pusriskel	BBRSEKP	BBRP2BKP
Target	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100
%	100,00	100,00	100,00	100,00



Gambar 16 Perbandingan Capaian Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Tahun 2023 dengan Eselon II Lainnya

Faktor pendukung tercapaian indikator kinerja ini adalah dengan tetap terselenggaranya kegiatan-kegiatan manajerial walaupun dengan diblokirnya anggaran. Capaian Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.

Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKK lain. Prosentase dokumen layanan menejeman yang tersedia/dibandingkan total dokumen layanan menejemen yang ditargetkan.

Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain terlaksananya monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatannya secara berkala. Selain itu, dengan koordinasi yang baik setiap kegiatan manajerial dapat di laksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan pelayanan dokumen manajerial dengan anggaran sebesar Rp.92.887.709.500 dan telah terealisasi sebesar Rp.91.523.748.799 (98,53%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,47%.

Capaian Kinerja Lainnya

Di samping Sasaran Strategis di atas terdapat beberapa keberhasilan kinerja antara lain:

Tugas Belajar, Izin Belajar dan Training

Petugas belajar di lingkungan Pusat Riset Perikanan sebanyak 45 pegawai, diantaranya melakukan tugas belajar di jenjang Strata 1 sampai dengan Strata 3. Petugas belajar di jenjang Strata 1 berjumlah 1 pegawai, petugas belajar di jenjang Strata 2 berjumlah 20 pegawai, dan petugas belajar Strata 3 berjumlah 24 pegawai. 7 pegawai diantaranya melakukan perpanjangan masa tugas belajar, 5 pegawai telah lulus tugas belajar dan telah aktif kembali dan sisanya masih dalam masa tugas belajar.

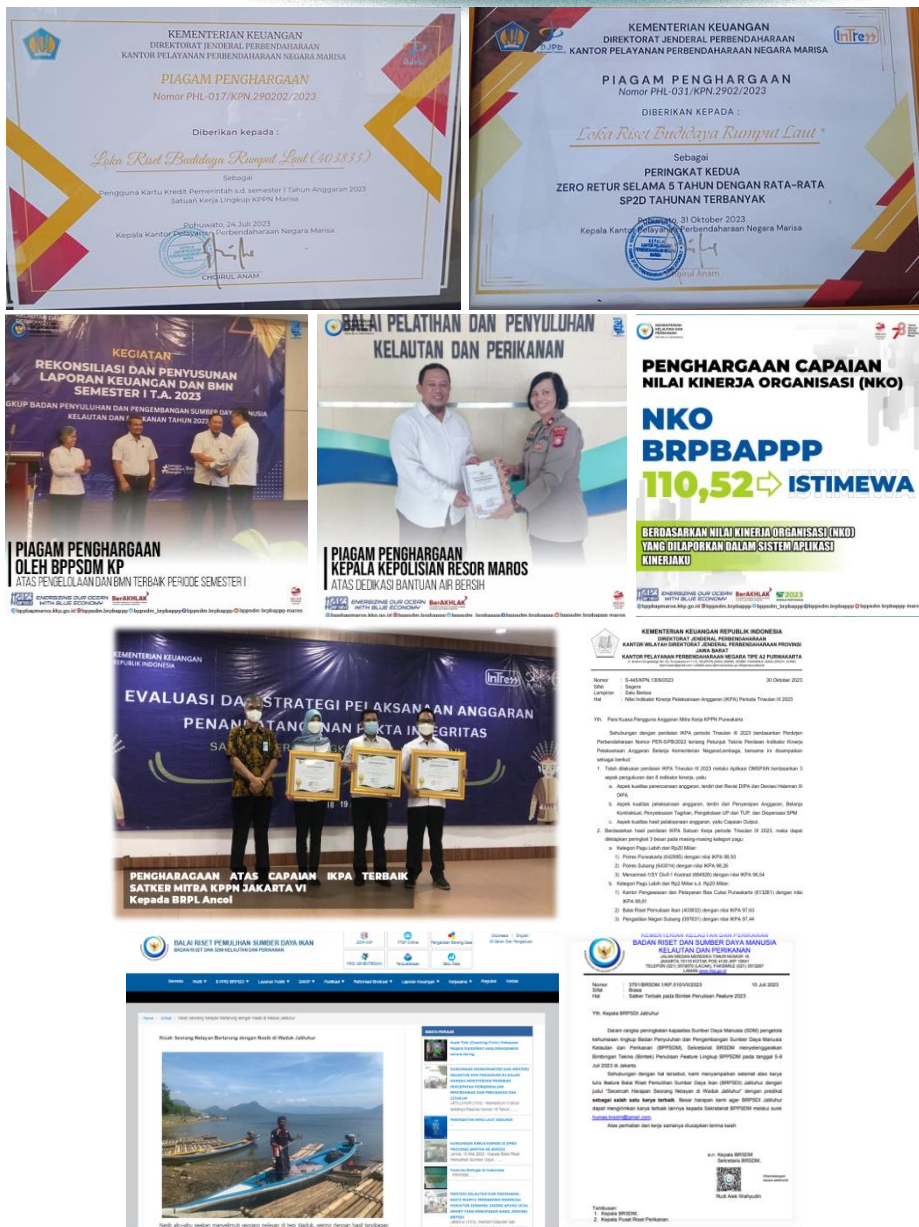
Selain tugas belajar, pegawai di lingkungan Pusat Riset Perikanan juga beberapa melakukan izin belajar sebanyak 68 pegawai. Pegawai yang melakukan izin belajar di jenjang Strata 1 sebanyak 26 pegawai, sebanyak 29 pegawai izin belajar di jenjang Strata 2, dan 8 pegawai izin belajar di jenjang Stara 3.

Penghargaan

1. Piagam Penghargaan diberikan kepada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan sebagai pencapaian Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Terbaik Lingkup BRSDM KP TA 2022
2. Piagam Penghargaan diberikan kepada Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan sebagai Peringkat I Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja dengan Predikat Best Performance Kategori Pagu DIPA Kelolaan Besar Tahun 2022
3. Piagam Penghargaan diberikan kepada Balai Riset Perikanan Laut sebagai pencapaian satuan kerja kategori AA (Sangat Memuaskan) Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BRSDM KP Tahun 2023
4. Piagam Penghargaan diberikan kepada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluh Perikanan sebagai pencapaian satuan kerja kategori AA (Sangat Memuaskan) Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BRSDM KP Tahun 2023
5. Piagam Penghargaan diberikan kepada Loka Riset Perikanan Tuna sebagai pencapaian satuan kerja kategori AA (Sangat Memuaskan) Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BRSDM KP Tahun 2023
6. Piagam Penghargaan diberikan kepada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (403823) sebagai Peringkat Kedua kategori Pagu Besar dalam Penilaian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) teraktif Semester I Tahun 2023
7. Sertifikat diberikan kepada Balai Riset Budidaya Ikan Hias (403830) atas capaiannya sebagai Peringkat Keempat penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) teraktif dengan kriteria penilaian berdasarkan konsistensi penggunaan, banyaknya transaksi, dan jumlah nilai transaksi
8. Piagam Penghargaan diberikan kepada Balai Riset Pemuliaan Ikan (403832) sebagai Peringkat Ketiga atas capaian Penilaian Transaksi Belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Satker Lingkup KPPN Purwakarta Periode Semester I Tahun 2023
9. Piagam Penghargaan diberikan kepada Loka Riset Budidaya Rumput Laut sebagai Pengguna Kartu Kredit Pemerintah s.d. Semester I Tahun 2023 satuan kerja lingkup KPPN Marisa
10. Piagam Penghargaan diberikan kepada Loka Riset Budidaya Rumput Laut sebagai Peringkat Ketiga IKPA Tertinggi Triwulan I Tahun Anggaran 2023

11. Piagam Penghargaan diberikan kepada Loka Riset Budidaya Rumput Laut (403833) sebagai Pengguna Kartu Kredit Pemerintah s.d. Semester I Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Lingkup KPPN Marisa
12. Piagam Penghargaan diberikan kepada Loka Riset Budidaya Rumput Laut sebagai Peringkat Kedua Zero Retur Selama 5 Tahun dengan Rata-rata SP2D Tahunan Terbanyak
13. Piagam Penghargaan diberikan kepada Balai Riset Budidaya Perikanan Air Payau dan Penyuluh Perikanan (BRPBAPPP) Maros atas Pengelolaan BMN Terbaik Periode Semester I
14. Piagam Penghargaan diberikan kepada Balai Riset Budidaya Perikanan Air Payau dan Penyuluh Perikanan (BRPBAPPP) Maros atas Dedikasi Bantuan Air Bersih
15. Penghargaan Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BRPBAPPP Istimewa Berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi yang dilaporkan dalam Sistem Aplikasi Kinerjaku
16. Penghargaan kepada Balai Riset Perikanan Laut atas Capaian IKPA Terbaik Satker Mitra KPPN Jakarta VI
17. Penghargaan kepada Balai Riset Pemuliaan Ikan (403832) atas Capaian IKPA Terbaik Kategori Pagu Lebih dari Rp 2 Miliar s.d. Rp 20 Miliar dengan nilai IKPA 97,63 periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023 Satker Mitra KPPN Purwakarta
18. Satker Terbaik pada Bimtek Penulisan Feature : Karya tulis feature Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) Jatiluhur dengan judul “Secercah Harapan Seorang Nelayan di Waduk Jatiluhur” dengan predikat sebagai salah satu karya terbaik.





Gambar 17 Sertifikat Penghargaan Lingkup Pusrisikan 2023

Akuntabilitas Keuangan TA 2023

Pada Tahun 2023 Program dan Kegiatan lingkup Pusat Riset Perikanan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya anggaran sebesar Rp.122.160.956.481 atau 98,74% dari alokasi anggaran sebesar Rp.123.717.469.000. Realisasi anggaran tersebut

dilaksanakan oleh unit kerja lingkup Pusat Riset Perikanan. Penyerapan anggaran berdasarkan Satuan Kerja lingkup Pusat Riset Perikanan berdasarkan aplikasi Omspan per tanggal 5 Januari 2024, sebagai berikut :

Tabel 40 Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Lingkup Pusrisikan (%)

NO	SATKER	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Pusrisikan, Ancol	14.779.483.000	14.714.355.799	99,56
2	BRPL, Ancol	6.013.402.000	5.803.164.779	96,50
3	BRPPU-PP, Palembang	15.380.768.000	14.827.223.042	96,40
4	BRPSDI, Jatiluhur	6.331.689.000	6.287.875.884	99,31
5	BBRBL-PP, Gondol	16.397.567.000	16.196.352.723	98,77
6	BRPBAP-PP, Maros	17.469.561.000	17.433.162.383	99,79
7	BRPBAT-PP, Bogor	13.066.346.000	12.977.081.787	99,32
8	BRBIH, Depok	10.880.559.000	10.832.209.004	99,56
9	BRPI, Sukamandi	10.486.705.000	10.391.533.381	99,09
10	LRPT, Bena	4.764.171.000	4.723.455.724	99,15
11	LRBRL, Gorontalo	3.669.735.000	3.562.587.595	97,08
12	LRMPHP, Bantul	4.477.483.000	4.411.954.380	98,54
TOTAL		123.717.469.000	122.160.956.481	98,74

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat satuan kerja di lingkup Pusrisikan dengan realisasi tertinggi adalah Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluh Perikanan (BRPBAP-PP), Maros sebesar 99,79%, dan untuk realisasi terendah adalah Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluh Perikanan (BRPPU-PP), Palembang sebesar 96,40%. Namun, secara keseluruhan realisasi satuan kerja lingkup Pusrisikan masih dianggap baik, dengan rata-rata realisasi diatas prognosa realisasi anggaran sebesar 98%.

Dalam pelaksanaan anggaran, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu buka blokir anggaran pada sasaran program Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan, kegiatan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pada Triwulan IV Tahun 2024 mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran selama tahun 2024.

Secara umum kinerja Pusrisikan Tahun 2023 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasilkan tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi

pelaksanaan kegiatan seperti penyesuaian rencana penarikan dana dan rencana operasional kegiatan setelah adanya kebijakan buka blokir. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian rencana penarikan dana dan rencana operasional sejak awal tahun apabila ada kegiatan yang di blokir.

Pada awal Tahun 2023, total pagu lingkup Pusat Riset Perikanan tersebut terdapat 2 (dua) program kegiatan. Program kegiatan Pusrisikan terdiri dari Kegiatan Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Namun dilakukan kebijakan buka blokir, sehingga hanya menyisakan 1 (satu) program kegiatan yaitu Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Pusrisikan TA 2023 cukup baik yaitu mencapai Rp.122.160.956.481 atau 98,74% dari alokasi anggaran sebesar Rp.123.717.469.000. Bila realisasi tersebut dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Pusrisikan yang mencapai 111,38% maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Pusrisikan cukup efisien dengan nilai efisiensi sebesar 12,64. Dapat diartikan dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil/sedikit dapat menghasikan capaian kinerja yang lebih tinggi.

Tabel 41 Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Utama dan Pendukung IK Tahun 2023

Indikator Kinerja		Target IK	Realisasi IK	%	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi
1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Miliar)	1,725	3,402	120,00	Layanan BMN	589.846.000	585.096.819	99,19	20,81
2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%)	≤0,5	0	120,00	Layanan Manajemen Keuangan	596.586.000	587.196.750	98,43	21,57
3	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)	78	90,77	116,37	Layanan Manajemen SDM	549.009.000	539.689.350	98,30	18,07
4	Nilai Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai)	76	80,9	106,45	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	527.452.500	521.424.248	98,86	7,59
5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)	93	97,33	104,66	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	378.068.000	359.370.955	95,05	9,61
6	Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92	116,58	120,00	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Riset dan SDM KP Layanan Data dan Informasi Layanan Hubungan Masyarakat	437.880.500	432.501.885	98,77	21,23

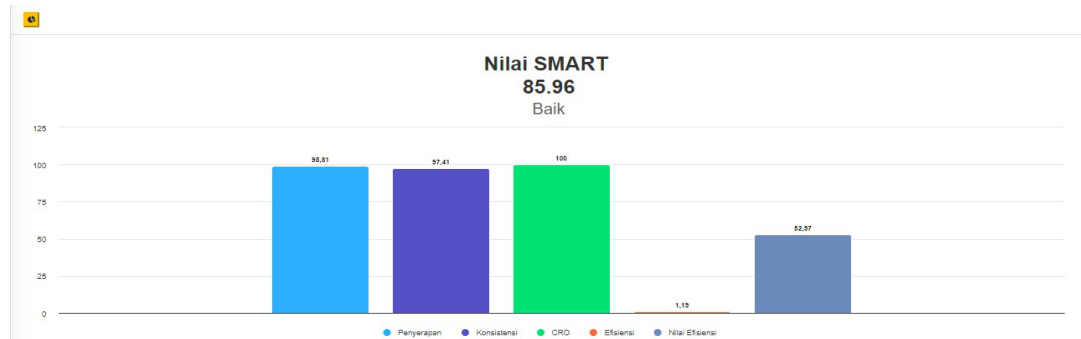
	Indikator Kinerja	Target IK	Realisasi IK	%	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi
7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%)	80	100	120,00	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	534.469.000	527.056.983	98,61	21,39
8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	93,75	90,98	97,05	Layanan Manajemen Keuangan	6.084.369.000	6.033.790.360	99,17	-2,12
9	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	82	85,96	104,83	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	20.697.744.500	20.620.450.474	99,63	5,2
10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)	30	33	120,00	Pelayanan Kerja Sama Riset Perikanan	434.335.000	430.629.860	99,15	20,85
11	Presentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya Pusat Riset Perikanan (%)	100	100	100,00	Layanan Dukungan Manajemen Internal	92.887.709.500	91.523.748.799	98,53	1,47
Jumlah				111,38		123.717.469.000	122.160.956.483	98,74	12,64

Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya

Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) merupakan satuan kerja di bawah Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Efisiensi Anggaran

Hasil perhitungan efisiensi anggaran Pusat Riset Perikanan adalah hasil pengukuran yang akan didapatkan pada akhir tahun. Hasil perhitungan efisiensi anggaran Pusriskan sebagaimana dalam tabel berikut ini melalui aplikasi Smart DJA pada Tahun 2023 per 5 Januari 2023 berikut.



Gambar 18 Nilai SMART (Nilai Kinerja Anggaran) Pusriskan Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 18, Nilai SMART pada aplikasi SMART DJA menunjukkan angka 85,96 atau kategori BAIK (80–90). Nilai SMART tersebut pada dasarnya merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang sampai dengan Tahun 2023, memiliki Nilai Efisiensi sebesar 52,97% yang berasal dari variable efisiensi yang mencapai 1,19%. Nilai efisiensi didapatkan dari membandingkan antara capaian keluaran (output) program, data realisasi anggaran dan data pagu anggaran, sedangkan efisiensi diukur dengan membandingkan dengan dua indikator variabel penilaian, yaitu realisasi anggaran dan capaian output. Angka Efisiensi sebesar 1,19% dipengaruhi oleh capaian output DIPA Ancol (Pusriskan dan Pusriskel) yang penyerapan anggarannya sebesar 98,81% dengan nilai CRO (Capaian Rincian Output) telah mencapai sebesar 100,00% pada akhir tahun. Adapun, efisiensi yang menunjukkan 1,19 ini adalah tidak menjadi variable yang *independen* (bebas), namun merupakan variable yang terikat, yaitu terikat dengan nilai realisasi anggaran dan nilai capaian keluaran (output) sehingga nilainya sangat menentukan dalam menggambarkan progress nilai kinerja anggaran yang sangat penting menjadi perhatian dalam monitoring dan evaluasi suatu organisasi. Nilai akhir Kinerja Anggaran dalam Smart DJA sangat dipengaruhi oleh nilai efisiensi yang dimaksud, tingginya nilai kinerja efisiensi berimplikasi pada tingginya Nilai Akhir Kinerja Anggaran. Sementara itu, jika nilai efisiensi rendah, maka akan berkontribusi pada rendahnya Nilai Kinerja Anggaran.

Selain itu, pada awal Triwulan III Tahun 2023 ini dilakukan penyesuaian pengisian Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Kelautan dan Perikanan dan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang masih dalam status blokir pada aplikasi SAKTI, kembali dihilangkan dengan cara penginputan capaian minus pada Bulan Juli di Aplikasi Omspan. Tindakan ini yang juga mengakibatkan terjadinya penurunan nilai efisiensi Pusat Riset Perikanan di Tahun 2023.

Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran dan sumber daya pada Pusriskan yaitu; perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta penyesuaian. Efisiensi tersebut merupakan hasil evaluasi anggaran dan sumber daya yang akan didapatkan setelah melalui rewiu anggaran maupun kinerja. Sepanjang Tahun 2023 Pusriskan telah melakukan revisi anggaran sebanyak 11 (sebelas) kali, berikut rinciannya.

Tabel 42 Kronologi Revisi Anggaran Pusat Riset Perikanan Tahun 2023

DIPA	Tanggal	Pagu	Pengesahan Revisi	Ket
Awal	30 Nopember 2023	18.935.318.000		
Revisi DIPA 1 dan POK 1	16 Februari 2023	18.935.318.000	Surat Kepala Kanwil Dirjen Perbend. DKI Jakarta Nomor : S-1552/WPB.12/2023 tanggal 16 Februari 2023	POK & Halaman 3 DIPA
Revisi DIPA 2 dan POK 2	17 April 2023	18.935.318.000	Surat Kepala Kanwil Dirjen Perbend. DKI Jakarta Nomor : S-2904/WPB.12/2023 tanggal 17 April 2023	POK & Halaman 3 DIPA
Revisi DIPA 3 dan POK 3	13 Juli 2023	18.935.318.000	Surat Kepala Kanwil Dirjen Perbend. DKI Jakarta Nomor : S-4407/WPB.12/2023 tanggal 13 Juli 2023	Revisi Halaman 3 DIPA & POK
Revisi POK 4	28 Juli 2023	18.935.318.000	Surat Kepala BRSDM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : B.670/BRSDM/RC.420/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023	Revisi POK
Revisi POK 5	30 Agustus 2023	18.935.318.000	Surat Kepala BRSDM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : B.1451/BRSDM/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023	Revisi POK
Revisi DIPA 4 dan Revisi POK 6	16 Oktober 2023	18.935.318.000	Surat Kepala Kanwil Dirjen Perbend. DKI Jakarta Nomor : [@NomorND] tanggal : [@TanggalND]	Revisi Kanwil DJPb : Revisi Halaman 3 DIPA & POK 6
Revisi DIPA 5	30 Oktober 2023	16.212.068.000	Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor : S-733/AG/AG.3/2023 tanggal 30 Oktober 2023	Revisi DJA : Revisi Belanja Modal dari Optimalisasi Anggaran Buka Blokir Tahun 2023
REVISI DIPA 6 dan Revisi POK 7	16 November 2023	14.779.483.000	Surat Kepala Kanwil Dirjen Perbend. DKI Jakarta Nomor : S-7559/WPB.12/2023 tanggal 16 November 2023	Revisi Kanwil DJPb : Revisi Pemanfaatan Sisa Belanja Pegawai Pusriskan untuk Belanja Operasional Politeknik AUP & POK

7

DIPA	Tanggal	Pagu	Pengesahan Revisi	Ket
Revisi POK 8	5 Desember 2023	14.779.483.000	Surat Kepala BRSDM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1125/BRSDM/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023	Revisi POK 8
Revisi POK 9	27 Desember 2023	14.779.483.000	Surat Kepala BRSDM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1217/KPA/BRSDM/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023	Revisi POK 9
REVISI DIPA 7	28 Desember 2023	14.779.483.000		Revisi Kanwil DJPb : Pemutkhiran data hasil revisi POK

Efisiensi Sumber Daya

Jumlah sumber daya manusia Lingkup Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) mengalami penurunan atau cenderung berkurang dibandingkan pada awal Tahun 2022 yang lalu, diantaranya pegawai dengan tingkat pendidikan S3 menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun 2022, karena adanya mutasi pegawai Lingkup Pusriskan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai dengan Perpres 78 Tahun 2021. Diantaranya jabatan fungsional Peneliti, Teknisi Litkayasa, dan Perekrayasa. Secara keseluruhan, jumlah pegawai Lingkup Pusriskan pada Tahun 2023 berkurang sebesar 51,51% dibandingkan pada Tahun 2022, hal tersebut dikarenakan jumlah pegawai yang mutasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Namun demikian seluruh kegiatan tetap dapat berjalan secara optimal dengan SDM yang ada sehingga target kinerja dapat tercapai.



#2023
HHP THRIVE



penutup

berkorona

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Sesuai dengan visi dan misi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di atas, pada Tahun 2023 Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 1 (satu) Sasaran Kinerja (SK) yang ingin dicapai. Untuk setiap Sasaran Kinerja (SK) yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Keseluruhan IKK termasuk kedalam Indikator Kinerja Mandatori (IKM) Pusat Riset Perikanan pada Tahun 2023 berjumlah 11 (sebelas) Indikator Kinerja Mandatori (IKM).

Berdasarkan aplikasi kinerjaku, capaian sasaran strategis Pusriskan dengan toleransi 0% menunjukkan Status Sasaran Strategis Indikatornya berwarna Hijau. Hal ini karena Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Tahun 2023 ini hampir seluruh targetnya telah tercapai kecuali pada IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (IKPA) yang capaiannya hanya tercapai 97,5%. Namun demikian, berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja melalui aplikasi kinerjaku.kkp.go.id Tahun 2023 capaian Pusriskan menunjukkan indikator Warna Biru atau Istimewa dengan nilai 111,38% atau secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Sasaran Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023, seluruhnya dapat tercapai dengan baik.

Dari aspek kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Pusriskan Tahun 2023 dikategorikan baik karena realisasi keuangannya dapat mencapai Rp.122.160.956.481 atau 98,74% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.123.717.469.000. Bila realisasi

tersebut dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Pusrisikan yang mencapai 111,38% maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Pusrisikan cukup efisien dengan nilai efisiensi sebesar 12,64.

Permasalahan dan Tindaklanjut

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Pusat Riset Perikanan Tahun 2023 dicapai dengan baik. Persentase pencapaiannya digambarkan dari proses perkembangan fisik kegiatan dari masing-masing Sasaran Strategis pada setiap periode waktu tertentu baik bulanan, triwulanan ataupun semesteran. Dalam proses pencapaian kinerjanya ada beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut mempengaruhi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan targetnya sehingga perlu dilakukan identifikasi alternatif rekomendasi untuk dilakukan tindak lanjutnya agar permasalahan tersebut dapat teratasi dan tidak terulang di masa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat permasalahan yaitu:

1. Tidak tercapainya target IKK Nilai IKPA Satker Pusat Riset Perikanan, dengan target sebesar 93,75 realisasinya hanya sebesar 90,98. Hal ini disebabkan terdapat dua indikator IKPA yang mendapatkan nilai rendah, yaitu Deviasi Hal. III DIPA (nilai 70,21) dan Penyerapan Anggaran (nilai 77,03). Selain itu, dua indikator IKPA yang lain juga belum mendapat nilai maksimal, yaitu Belanja Kontraktual (nilai 91) dan Pengelolaan UP & TUP (nilai 94,05).
2. Pusrisikan sudah melakukan reuiu renstra pada tahun 2023 namun blm disertai dengan perbaikan target kinerja tahun 2024. Sehingga pada pembahasan perbandingan indikator kinerja tahunan dengan indikator kinerja jangka menengah masih membandingkan dengan target yang sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, beberapa alternatif rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Pusrisikan, diantaranya:

1. Untuk meningkatkan nilai IKPA, terutama pada indikator Deviasi Hal. III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, dan

Pengelolaan UP & TUP, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga agar indikator Deviasi Hal. III DIPA tidak melebihi nilai optimum, perlu dilakukan penyesuaian RPD pada Halaman III DIPA per jenis belanja setiap triwulan serta lebih memperhitungkan apabila terdapat anggaran dengan status blokir,
 - b. Untuk meningkatkan indikator Penyerapan Anggaran, agar merealisasikan anggaran sesuai target yang sudah ditetapkan setiap triwulan, menjaga konsistensi realisasi dari awal tahun hingga akhir tahun mengingat penghitungan komponen nilai realisasi dalam IKPA dihitung secara akumulasi dari awal tahun hingga akhir tahun serta melakukan koordinasi antara tim kerja dalam memanfaatkan dana yang sudah ditarik sehingga antara RPD dan realisasi kegiatan sesuai,
 - c. Untuk meningkatkan indikator Belanja Kontraktual, agar belanja kontraktual dengan nilai di bawah Rp 200.000.000 pelaksanaannya dilaksanakan pada Triwulan I dengan rencana realisasi belanja modal dan pemeliharaan disiapkan dengan data dukung yang tepat sehingga pelaksanaannya dapat tepat waktu,
 - d. Untuk meningkatkan indikator Pengelolaan UP & TUP, agar menghitung kembali kebutuhan operasional rutin bulanan satker dalam menggunakan UP tunai secara efektif dan efisien sehingga pertanggungjawaban UP dan TUP dapat tepat waktu serta maksimal tanpa adanya setoran pengembalian dana TUP ke kas negara.
2. Pusrisikan melakukan reviu renstra dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan kebijakan terkait perubahan target perjanjian kinerja di tahun 2023.

Dengan tindakan yang dilakukan tersebut dihasilkan efektifitas progress capaian output yang cepat, tepat, sesuai rencana penarikan dana dan target baru yang telah ditentukan. Namun demikian, tingkat pencapaian kinerja secara umum Tahun 2023 sebesar 111,38%

dipandang lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 104,90%.

Penutup

Selaras dengan capaian Badan Riset dan SDM KP, pencapaian Kinerja Pusrisikan terhadap Target Sasaran Kinerja IPTEK penelitian dan pengembangan perikanan pada Tahun 2023 dengan tindakan penyelesaian permasalahan yang dihadapi, dapat menjadi salah satu upaya strategis dalam merumuskan kebijakan dan program di tahun mendatang.

Kinerja pada dasarnya adalah Komitmen, Konsistensi dan Konsekuensi dalam merencanakan, melaksanakan, mencapai dan menghasilkan output yang berkualitas, yang akan berdampak pada kualitas hasil yang diharapkan. Untuk mencapainya, akan selalu diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak dalam melaksanakan komitmen yang telah ditetapkan. Komitmen harus direncanakan dengan cermat, intuitif, solusif, konstruktif dan inovatif untuk mengemban amanah (visi, misi, tujuan dan sasaan) IPTEK Kelautan dan Perikanan. Hasil kinerja yang tercapai tentu tidak hanya menjadi laporan yang selanjutnya akan didokumentasikan dan kemudian diarsipkan, namun harus menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan kedepan, dan dapat memberikan dampak dalam aplikasi nyata kebijakan pembangunan KP serta pemenuhan Komitmen dalam RPJM RI 2021-2024, Visi KKP, Misi Badan Riset dan SDM KP dan Renstra Pusrisikan 2021-2024.

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan harus dilakukan lebih cermat dan matang, dengan mempertimbangkan sasaran dan tujuan organisasi secara tepat sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dan faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan yang terjadi. Strategi dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan wawasan untuk mengetahui perkembangan issue dan permasalahan terkini harus selalu diupayakan dalam memulai langkah di tahun mendatang.

Akhirnya, Laporan Kinerja (LKj) Pusrisan Tahun 2023 diharapkan menjadi “cermin” sekaligus pertanggung jawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah dan tindakan kedepan dalam perencanaan. Dengan demikian harapan bahwa terbentuknya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan terwujud. Selain itu, LKj ini dapat juga menjadi salah satu kontribusi dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di tahun mendatang.



#2023
HHP THRIVE



lampiran

lanjutan

LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian Kinerja Pusrisikan 2023 awal (9 Januari 2023)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513278
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT RISET PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Riset Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak kesatu**

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan

Pihak Kesatu
Kepala Pusat Riset Perikanan


I Nyoman Radiarta


Yayan Hikmayani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT RISET PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Perikanan (NSPK)	4
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Milyar)	1,668
		3	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Perikanan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Perikanan TA 2022 (%)	≤0,5
		4	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)	78
		5	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai)	76
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)	92
		7	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Perikanan (%)	92
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Pusat Riset Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		9	Nilai IKPA Pusat Riset Perikanan (Nilai)	89
		10	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	82
		11	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)	19
		12	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya Pusat Riset Perikanan (%)	100

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	2.323.250.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	128.251.000.000
Total Anggaran Pusat Riset Perikanan Tahun 2023		130.574.250.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan


I Nyoman Radjarta

Pihak Kesatu
Kepala Pusat Riset Perikanan


Yayan Hikmayani



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513278
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT RISET PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Riset Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak kesatu**

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Juni 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan

Pihak Kesatu
Kepala Pusat Riset Perikanan


I Nyoman Radiarta


Yayan Hikmayani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT RISET PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Perikanan (NSPK) *)	4
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Milyar)	1.668
		3	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Perikanan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Perikanan TA. 2022 (%)	≤0,5
		4	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)	78
		5	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai)	76
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)	92
		7	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Perikanan (%)	92
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Pusat Riset Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		9	Nilai IKPA Pusat Riset Perikanan (Nilai)	89
		10	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	82
		11	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)	19
		12	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya Pusat Riset Perikanan (%)	100

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan *)	2.323.250.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	124.734.752.000
Total Anggaran Pusat Riset Perikanan Tahun 2023		127.058.002.000

(*) Blokir

Jakarta, 20 Juni 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Kepala Pusat Riset Perikanan


Yayan Hikmayani



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513278
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT RISET PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yayan Hikmayani**
Jabatan : Kepala Pusat Riset Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak kesatu**

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

Pihak Kesatu
Kepala Pusat Riset Perikanan


I Nyoman Radiarta


Yayan Hikmayani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT RISET PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Miliar)	1,725
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%)	≤ 0,5
		3	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)	78
		4	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai)	76
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)	93
		6	Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92
		7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%)	80
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	93,75
		9	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	82
		10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)	30
		11	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya Pusat Riset Perikanan (%)	100

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	123.717.469.000
Total Anggaran Pusat Riset Perikanan Tahun 2023		123.717.469.000

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Kepala Pusat Riset Perikanan


Yayan Hikmayani

Lampiran Nilai NPSS Pusriskan (Kinerjaku)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



e-Kinerja Home

Senin, 15 Januari 2024

NKO Desember - 2023

Download

Unit Kerja : PUSAT RISET PERIKANAN

Skor Kinerja : 111.38

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2023	Target Desember	Capaian Desember	%	Target s/d Desember	Capaian s/d Desember	%	Tgl Input
SK.01	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP											
SK.02	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							111,38		111,38		
IKSK.01.01	Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Miliar)	Rupiah Miliar	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,73	1,73	3,40	120,00	1,73	3,40	120,00	10-Jan-2024 13:46
IKSK.01.02	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%) Data Dukung1	%	Minimize	Nilai Posisi Akhir	0,50	0,50	0,00	120,00	0,50	0,00	120,00	10-Jan-2024 13:46
IKSK.01.03	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks) Data Dukung1	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	78,00	78,00	90,77	116,37	78,00	90,77	116,37	10-Jan-2024 13:46
IKSK.01.04	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai) Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76,00	76,00	80,90	106,45	76,00	80,90	106,45	10-Jan-2024 13:46
IKSK.01.05	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai) Data Dukung1 Data Dukung2	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,00	93,00	97,33	104,66	93,00	97,33	104,66	10-Jan-2024 13:46
IKSK.01.06	Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) Data Dukung1	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	92,00	116,58	120,00	92,00	116,58	120,00	10-Jan-2024 13:46
IKSK.01.07	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%) Data Dukung1	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	80,00	100,00	120,00	10-Jan-2024 13:46
IKSK.01.08	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai) Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,75	93,75	90,98	97,05	93,75	90,98	97,05	10-Jan-2024 13:46
IKSK.01.09	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai) Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	82,00	85,96	104,83	82,00	85,96	104,83	10-Jan-2024 13:46
IKSK.01.10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)	Kemitraan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	30,00	30,00	33,00	110,00	30,00	33,00	110,00	10-Jan-2024 13:46
IKSK.01.11	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya Pusat Riset Perikanan (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10-Jan-2024 13:46

Tutup

Lampiran Rekapitulasi Kemitraan Lingkup Pusat Riset Perikanan Tahun 2023

No	Judul Kegiatan	Pihak KKP	Jenis Dokumen	Pihak Mitra	Informasi Penandatanganan	Mulai	Selesai
1	Implementation of the Arafura and Timor Seas Regional and National Strategic Action Programs (ATSEA-2); Second Phase of the Arafura Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) Program: Regional and PNG Components	Pusriskan	Agreement	United Nations Development Programme (UNDP)		01-Feb-19	31-Dec-24
2	Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use into Inland Fisheries Practices in Freshwater Ecosystem of High Conservation Value (IFish)	Pusriskan	Agreement	FAO		20-Jun-17	19-Aug-23
3	Kerja sama dalam rangka tri dharma perguruan tinggi di bidang kelautan dan perikanan	BRPPUPP	Nota Kesepahaman	Univ Islam Raden Fatah	Nomor : 35/BRSDM/KKP/ PKS/IX/2023	07/09/2023	07/09/2024
4	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada balai riset perikanan umum dan penyuluhan perikanan palembang (BRPPUPP) melalui program pendidikan sarjana dan pascasarjana di universitas terbuka	BRPPUPP	PKS	UT	Nomor 47/BPPSDM/KKP /PKS/X/2023	02/10/2023	02/10/2026
5	Pengembangan <i>specialarea for conservation and fish refugia</i> (spectra) melalui kegiatan revitalisasi lahan	BRPPUPP	PKS	PT Dizamatra Powerindo	Nomor 53/BPPSDM/KKP /PKS/X/2023	31/10/2023	31/10/2025
6	Sewa menyewa BMN	BRPPUPP	Perjanjian Sewa Menyewa	PT Dizamatra Powerindo	Nomor 1421/BPPSDM/K KP/PL.210/X/2023	31/10/2023	31/10/2028

No	Judul Kegiatan	Pihak KKP	Jenis Dokumen	Pihak Mitra	Informasi Penandatanganan	Mulai	Selesai
7	<i>Establishing and operating a regional system of fisheries refugia in the south china sea and gulf of thailand</i>	BRPSDI	Letter Of Agreement	SEAFDEC		31/12/2022	31/03/2023
8	Peningkatan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya	BRPSDI	PKS	Univ 17 Agustus 1945 Cirebon	Nomor 37/BPPSDM/KKP/PKS/IX/2023	15/09/2023	15/09/2025
9	Sewa menyewa BMN	BBRBLPP	Perjanjian Sewa Menyewa	CV Jaya Utama Abadi	Nomor B.582/BRSDM-BBRBLPP/PL.700/III/2022	03/07/2022	03/07/2025
10	Sewa menyewa BMN	BBRBLPP	Perjanjian Sewa Menyewa	Koperasi Pegawai "Balai Dita"	Nomor B.1818/BRSDMBRBLPP/PL.700/VIII/2021	07/02/2021	07/02/2024
11	Sewa menyewa BMN	BBRBLPP	Perjanjian Sewa Menyewa	UD "Hadi Rama"	Nomor B.135/BRSDMBBRBLPP/PL.700/V/2021	08/02/2022	08/02/2025
12	Pendampingan pembenihan/pennggelondongan udang dan pemasaran benur udang vaname mendukung program <i>smart village</i> (SFV)	BRPBAPPP	PKS	CV. Seruni Benur	NOMOR : 4/BRSDM/KKP/PKS/I/2023	24/01/2023	24/01/2025
13	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan potensi perikanan sulawesi selatan	BRPBAPPP	PKS	Poltek Pertanian Pangkajene	NOMOR : 1502/BRSDM/KKP/IX/2020	09/04/2020	09/04/2025
14	Penyelenggaraan pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan di bidang pembenihan udang windu dan pembesaran udang windu F1 di tambak teknologi tradisional plus sampai semi intemsif mendukung <i>Smart Fisheries Village</i> unit pelayanan teknis	BRPBAPPP	PKS	PT. Tri Karya Pratama	NOMOR : 10/BRSDM/KKP/IX/2023	03/06/2023	03/06/2028

No	Judul Kegiatan	Pihak KKP	Jenis Dokumen	Pihak Mitra	Informasi Penandatanganan	Mulai	Selesai
15	Peningkatan produktifitas serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan Perikanan berbasis teknologi mendukung program <i>Smart Fisheries Village</i>	BRPBAPPP	PKS	Jala Tech	NOMOR : 8/BRSDM/KKP/PKS/I/2023	24/01/2023	24/01/2025
16	Penyediaan naupli udang vaname unggul berkualitas dan tenaga ahli pembenihan udang mendukung program <i>Smart Fisheries Village (SFV)</i> untuk pengembangan SDM KP	BRPBAPPP	PKS	PT. Esaputlii Pratama	NOMOR : 3/BRSDM/KKP/PKS/I/2023	30/01/2023	30/01/2025
17	Perjanjian Sewa menyewa	BRPBATPP	Perjanjian Sewa menyewa	PT. BRI TBK	NOMOR : 01/BRSDM-BRPBATPP/KKP/PKS/XII/2023	22/12/2023	21/12/2026
18	Vaksin Hydrogalaksi	BRPBATPP	Perjanjian Lisensi	PT. Caprifarmindo	NOMOR : 10/BRSDM-BRPBATPP/KKP/PKS/VIII/2020	08/12/2020	08/12/2025
19	Pendampingan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi budidaya ikan, perbanyak, dan distribusi benih ikan dan calon induk unggul ikan Mas	BRPI	PKS	Kelompok Pembudidaya Ikan Cahaya Mas Gembor	NOMOR :99 /BRSDM/KKP /PKS/XII/2022	23/12/2022	23/12/2025
20	Pendampingan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi budidaya ikan, perbanyak, dan distribusi benih ikan dan calon induk unggul ikan Lele	BRPI	PKS	Kelompok Pembudidaya Ikan Darussalam Sukses Sejahtera	NOMOR :96 /BRSDM/KKP /PKS/XII/2022	21/12/2022	21/12/2025
21	Pendampingan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi budidaya ikan, perbanyak, dan distribusi benih ikan dan calon induk unggul ikan Lele	BRPI	PKS	Kelompok Pembudidaya Ikan Maju Jaya	NOMOR :97/BRSDM/KKP /PKS/XII/2022	23/12/2022	23/12/2025

No	Judul Kegiatan	Pihak KKP	Jenis Dokumen	Pihak Mitra	Informasi Penandatanganan	Mulai	Selesai
22	Pendampingan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi budidaya ikan, perbanyak, dan distribusi benih ikan dan calon induk ikan unggul	BRPI	PKS	Kelompok Pembudidaya Ikan Mekarwangi	NOMOR :94/BRSDM/KKP /PKS/XII/2022	23/12/2022	23/12/2025
23	Pendampingan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi budidaya ikan, perbanyak, dan distribusi benih ikan dan calon induk unggul ikan Nila	BRPI	PKS	Kelompok Pembudidaya Ikan Mimi Soka	NOMOR :95/BRSDM/KKP /PKS/XII/2022	21/12/2022	21/12/2025
24	Pendampingan dan pelatihan budidaya Ikan Patin PERKASA dan Gurami BIMA di Desa Cikadu untuk mendorong terbentuknya kampung ikan	BRPI	PKS	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "RAHAYU"	2/BRSDM/KKP/PKS/I/2022	01/04/2022	01/04/2025
25	Pendampingan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi budidaya ikan, perbanyak, dan distribusi benih ikan dan calon induk unggul ikan Lele	BRPI	PKS	Kelompok Pembudidaya Ikan Sumber Hayati	IIMOR: 100/BRSDM/KKP /PKS/XII/2022	21/12/2022	21/12/2025
26	Pendampingan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi budidaya ikan, perbanyak, dan distribusi benih ikan dan calon induk unggul ikan Patin	BRPI	PKS	Kelompok Pembudidaya Ikan Waluya Abadi Lengkong	NOMOR :98/BRSDM/KKP /PKS/XII/2022	23/12/2022	23/12/2025
27	Kemitraan Dalam Rangka Pelatihan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi Yang <i>Link And Match</i> dengan Industri	LRMPHP	PKS	SMK NEGERI 1 JEPARA	185/BRSDM-LRMPHP/KP.320 /111/2023	13/03/2023	13/03/2025

No	Judul Kegiatan	Pihak KKP	Jenis Dokumen	Pihak Mitra	Informasi Penandatanganan	Mulai	Selesai
28	Kemitraan dalam Rangka Pelatihan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi Yang <i>Link and Match</i> Dengan Industri	LRMPHP	PKS	SMK NEGERI 1 Tanjungsari	NOMOR: 31/BRSDM/KKP/ PKS/VII/2023	31/7/20 23	31/7/20 26
29	Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Budidaya Rumput Laut Mendukung <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV) / Desa Perikanan Cerdas UPT	LRBRL	PKS	SMK N 1 Paguyaman Pantai	90/BPPSDM/KKP /PKS/XI/2023	13/11/2 023	13/11/2 026
30	Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Mendukung <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV) / Desa Perikanan Cerdas UPT	LRBRL	PKS	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo	89/BPPSDM/KKP /PKS/X/2023	21/10/2 023	21/10/2 026
31	Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penyediaan Bahan Baku Sisa Organik Makanan Organik Program Oke Sobat (olah kembali sisa organik makanan organik bersama MAgoT)	BRBIH	PKS	Hotel Bumi Wiyata	NOMOR : 76/BRSDM- BRBIH/KKP/KKP /PKS/XII/2023	12/06/2 023	12/06/2 025
32	Produk dan <i>miniplant of low carbon feed</i> Indonesia untuk mendukung <i>Smart Fisheries Village</i>	BRBIH	PKS	PT. Greenprosa Adikara Nusa	NOMOR : 80/BRSDM- BRBIH/KKP/KKP /PKS/XII/2023	12/06/2 021	12/06/2 023
33	Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penyediaan Bahan Baku Sisa Organik Makanan Organik Program Oke Sobat (olah kembali sisa organik makanan organik bersama MAgoT)	BRBIH	PKS	Hotel Savero	NOMOR : 77/BRSDM- BRBIH/KKP/KKP /PKS/XII/2023	12/06/2 023	12/06/2 025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT RISET PERIKANAN
NOMOR 18/BRSDM.3/TU.110/I/2023**

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN KINERJA PUSAT RISET PERIKANAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT RISET PERIKANAN

- Menimbang** : a. bahwa agar pengelolaan kinerja organisasi di Pusat Riset Perikanan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu membentuk Tim Pengelolaan Kinerja Pusat Riset Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Pusat Riset Perikanan Tahun 2022 tentang Tim Pengelolaan Kinerja Pusat Riset Perikanan Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-

- KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT RISET PERIKANAN TENTANG TIM PENGELOLAAN KINERJA PUSAT RISET PERIKANAN TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Kinerja Pusat Riset Perikanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut TPK Pusrisikan, yang terdiri dari Penanggung Jawab dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini;

KEDUA : TPK Pusrisikan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Penanggung Jawab:

1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata kelola kinerja Pusrisikan;
2. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan tata kelola kinerja Pusrisikan;

B. Pelaksana

1. Koordinator:

Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan verifikasi kinerja di Pusat Riset Perikanan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan;

2. Tim Perencanaan Kinerja:
 - a. Memastikan bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah tersusun dan memuat:
 - 1) visi, misi, dan program;
 - 2) tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan dan target;
 - 3) sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran dan target tahunan ; dan
 - 4) indikator kinerja utama.
 - b. Memastikan bahwa Indikator Kinerja:
 - 1) digunakan sebagai ukuran kinerja formal;
 - 2) indikator kinerja eselon II telah selaras dengan IKU Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - 3) indikator kinerja memenuhi kinerja SMART-C; dan
 - 4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Pusat Riset Perikanan.
 - c. Memastikan bahwa dokumen Kontrak Kinerja:
 - 1) perjanjian kinerja;
 - 2) peta strategis;
 - 3) rincian target IKU secara bulanan/triwulan/semesteran/ tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU; dan
 - 4) inisiatif strategis/rencana aksi atas perjanjian kinerja.
 - d. Memastikan bahwa rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan;
 - e. Memastikan bahwa seluruh sasaran strategis, indikator kinerja, target dan rencana aksi diinput ke dalam aplikasi pengelolaan kinerja; dan
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada Pusat Riset Perikanan.
3. Tim Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja:
 - a. Menyusun pedoman/mechanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
 - b. Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan);
 - c. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - d. Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada Pusat Riset Perikanan;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (triwulan dan tahunan);
 - f. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- g. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/ data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
 - h. Memastikan LKj yang telah disusun, disampaikan tepat waktu dan diunggah kedalam laman resmi;
 - i. Mengkoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang di Pusat Riset Perikanan;
 - j. Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen, hasil pelaporan kinerja;
 - k. Memastikan seluruh rekaman data, informasi dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan terdokumentasi dengan baik; dan
4. Tim Evaluasi Kinerja dan Verifikasi Kinerja:
- a. Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - b. Menyusun laporan nilai evaluasi kinerja yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan pengendalian dan peningkatan kinerja selanjutnya;
 - c. Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan (SAKIP) di Pusat Riset Perikanan;
 - d. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan;
 - e. Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang di Pusat Riset Perikanan;
 - f. Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen, hasil perencanaan kinerja;
 - g. Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen, hasil pengukuran kinerja;
 - h. Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen, hasil pelaporan kinerja;
 - i. Memastikan seluruh rekaman data, informasi dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan terdokumentasi dengan baik; dan
 - j. Mengkoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang di Pusat Riset Perikanan.
5. Tim Kinerja Pegawai:
- a. Menyelaraskan indikator kinerja pegawai dengan indikator kinerja organisasi;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan sasaran kinerja pegawai yang telah menggambarkan hubungan antara kinerja organisasi dengan sasaran kinerja pegawai;
 - c. Memastikan adanya integrasi sistem pengelolaan kinerja pegawai dengan sistem pengelolaan organisasi;


- d. Memastikan penerapan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) berbasis kinerja pada setiap pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi berkala di Pusat Riset Perikanan.

- KETIGA** : TPK Pusrisikan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan narasumber/pakar/praktisi/tenaga ahli/konsultan untuk memperkaya informasi dan teknologi aplikasi sesuai kebutuhan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, TPK Pusrisikan Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Riset Perikanan;
- KELIMA** : Masa kerja TPK Pusrisikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Pusat ini sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEENAM** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Pusat ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pusat Riset Perikanan Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 5 Januari 2023

Kepala Pusat Riset Perikanan




Yayan Hikmayani, S.Pi, M.Si
NIP.19671004 199903 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT RISET PERIKANAN
NOMOR 18/BRSDM.3/TU.110/I/2023
TENTANG TIM PENGELOLAAN KINERJA PUSAT
RISET PERIKANAN TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN KINERJA
PUSAT RISET PERIKANAN
TAHUN 2023**

A. Penanggung Jawab :
Kepala Pusat Riset Perikanan

B. Pelaksana :

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
Tim Perencanaan Kinerja		
1.	Dra. Endang Sriyati Perencana Ahli Madya, Ketua Tim Kerja Program, Anggaran dan Monev	Koordinator
2.	Noor Bimo Adhiyudanto, S.Si. Perencana Ahli Muda, Tim Kerja Program, Anggaran dan Monev	Anggota
3.	Niken Winarsih, SE.E, M.M Perencana Ahli Muda, Tim Kerja Program, Anggaran dan Monev	Anggota
4.	Susanna Purna Dewi Suharto, A.Md.	Anggota
Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja		
1.	Dra. Endang Sriyati Perencana Ahli Madya, Ketua Tim Kerja Program, Anggaran dan Monev	Koordinator
2.	Drs. Nurbakti Listyanto Perencana Ahli Muda, Tim Kerja Program, Anggaran dan Monev	Anggota
3.	M. Muslim Mandailing, S.P., M.Si.	Anggota
4.	Chitra Restu Agustin, S.E.	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
Sub Tim Evaluasi Kinerja dan Verifikasi Kinerja		
1.	Dra. Endang Sriyati Perencana Ahli Madya, Ketua Tim Kerja Program, Anggaran dan Monev	Koordinator
2.	Sugesti Titik Maryati, S.E. Perencana Ahli Muda, Tim Kerja Program, Anggaran dan Monev	Anggota
3.	M. Aziz Baharsyah, S.Pi.	Anggota
4.	Ananda Listya, S.Pi.	Anggota
Tim Kinerja Sumber Daya Manusia		
1.	Dra. Hera Rusida, M.M. Analis Pengelolaan APBN Ahli Madya, KoordinatorTata Usaha	Koordinator
2.	Dwi Primawati, S.H.	Anggota
3.	Norma Tri Utami, A.Md.	Anggota

Kepala Pusat Riset Perikanan



Hikmayani
Hikmayani, S.Pi, M.Si
NIP. 19671004 199903 2 001

Lampiran Surat Tugas Kepala Pusat Riset Perikanan nomor
B.789/BRSDM.3/KP444/IV 2023 tanggal 3 April 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KOMPLEK BINA SAMUDERA JL. PASIR PUTIH II LANTAI 2-3,
ANCOL TIMUR, JAKARTA UTARA 14430
TELEPON (021) 64700928 EXT 2127

LAMAN <https://kkp.go.id/brsdrm/pusriskan> EMAIL pusriskan@kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor B.789 /BRSDM.3/KP.444/IV/2023

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan mekanisme kerja untuk penyederhanaan birokrasi dan peningkatkan kolaborasi guna mencapai sinergi dalam mewujudkan target kinerja, maka dengan ini menugaskan pegawai yang namanya tertera dalam surat tugas ini.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; dan
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMBERI TUGAS

- Kepada : sebagaimana terlampir
- Untuk : Melaksanakan penugasan sebagai Ketua dan Anggota Tim Kerja dengan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Ketua Tim Kerja
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja (IK) dalam kelompok kerja terkait;
 - b. membagi peran anggota Tim Kerja sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - d. melakukan pemantauan atas hasil kinerja anggota timnya dan memberikan umpan balik berkala kepada anggota Tim Kerja;
 - e. melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana;
 - f. melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar Tim Kerja dan/atau Unit Kerja lainnya;
 - g. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi intensif antar anggota Tim Kerja;
 - h. melaksanakan kegiatan lain sesuai penugasan Kepala Pusat Riset Perikanan

2. Anggota Tim Kerja
 - a. menyusun rencana kerja individu;
 - b. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan unit organisasi melalui pembagian peran hasil oleh ketua Tim Kerja;
 - c. melakukan koordinasi dengan sesama anggota dan/atau dengan Tim Kerja lain sesuai kebutuhan;
 - d. melaporkan hasil kerjanya kepada ketua Tim Kerja; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain sesuai penugasan Ketua Tim Kerja.

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 3 April 2023
Kepala Pusat Riset Perikanan,

Yayan Hikmayani

Tembusan:
Pegawai yang ditugaskan

Lampiran Surat Tugas

Nomor : B.789/BRSDM.3/KP.444/IV/2023

Tanggal : 3 April 2023

**NAMA DAN URAIAN FUNGSI TIM KERJA PUSAT RISET PERIKANAN
TAHUN 2023**

NO	NAMA TIM KERJA	URAIAN FUNGSI	INDIKATOR KINERJA
1.	Kemitraan dan PNPB	Koordinasi dan pelaksanaan layanan eksternal dalam kemitraan dan PNPB lingkup Pusat Riset Perikanan, termasuk dukungan SFV	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusrisikan (kemitraan)
			Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan
2.	Program dan Monev	Koordinasi dan pelaksanaan AKIP, penyusunan program, anggaran, monitoring, evaluasi, laporan dan rekonsiliasi kinerja serta nilai kinerja anggaran lingkup Pusat Riset perikanan	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Perikanan (nilai)
			Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)
			Nilai NKA Pusat Riset Perikanan (nilai)
3.	Keuangan	Koordinasi dan pelaksanaan keuangan (LK, SPIP, MR, PIPK), rekomendasi dan tindaklanjut hasil audit BPK, APIP dan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan anggaran lingkup Pusat Riset Perikanan	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Perikanan 2023
			Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Pusat Riset Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
			Nilai IKPA Pusat Riset Perikanan (nilai)
4.	SDM Aparatur, Sistem manajemen pengetahuan dan dukungan manajemen lainnya	Koordinasi dan pelaksanaan urusan SDM Aparatur, sistem manajemen pengetahuan terstandar dan dukungan manajemen teknis lainnya lingkup Pusat Riset Perikanan	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Perikanan (indeks)
			Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Pusat Riset Perikanan (%)
			Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya Pusat Riset Perikanan (%)



Kepala Pusat Riset Perikanan,

Edyan Hikmayani

Lampiran Surat Tugas

Nomor : B.189/BRSDM.3/KP.444/IV/2023

Tanggal : 3 April 2023

**SUSUNAN TIM KERJA PUSAT RISET PERIKANAN
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
A.	Tim Kerja Kemitraan dan PNBP		
1.	Tri Handanari, S.Si, M.Sc	Perencana Madya	Ketua
2.	Ariani Andayani, S.Si, M.Sc	Analisis Kebijakan Madya	Anggota
3.	Ria Faizah, S.Pi, M.Si	Analisis Kebijakan Madya	Anggota
4.	Kamaluddin Kasim, S.Pi., M.Sc	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
5.	Aisyah, ST., M.Si	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
6.	Arief Gunawan, S.Kom	Pustakawan Muda	Anggota
7.	I Gede Bayu Sedana, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	Anggota
8.	Fristiya Heri Kartika, S.Kom	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Anggota
9.	Sandi Wibowo, S.T	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
10.	Kusnandi	Pengadministrasi Program dan Laporan	Anggota
11.	Dwi Prasetyo, S.Pi.	Pegadministrasi Kerja Sama	Anggota
12.	Citra Sundawa, S.Kom	Pengadministrasi Data	Anggota
13.	Dedy Supriyadi, S.Kom	Pengadministrasi Program dan Kegiatan	Anggota
B.	Tim Kerja Program dan Monev		
1.	Dra. Endang Sriyati	Perencana Madya	Ketua
2.	Sugesti Titik Maryati S.E.	Perencana Muda	Anggota
3.	Drs. Nurbakti Listyanto	Perencana Muda	Anggota
4.	Hadhi Nugroho, S.T	Perencana Muda	Anggota
5.	Noor Bimo Adhiyudanto, S.Si.	Perencana Muda	Anggota
6.	Niken Winarsih, S.E	Perencana Muda	Anggota
7.	Muhammad M. Mandailing, S.Pi., M.Si	Penyusun Rencana Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
8.	Bambang Trias Yulianto, S.Fil., M.Si	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
9.	Asmuil, S.Pi	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
10.	Susanna Purna Dewi Suharto, A.Md.	Pengelola Program dan Laporan	Anggota

11.	Hari Ilhamdi, S.Pi	Perencana Pertama	Anggota
12.	Natasa Kinski, S.Kom	Pengadministrasi Anggaran	Anggota
13.	Dani Candra Rukmana, S.Pi	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota
14.	Ananda Listya, S.Pi	Pengadministrasi Monev dan Pelaporan	Anggota
15.	Chitra Restu Agustin, S.E	Pengadministrasi Monev dan Pelaporan	Anggota
16.	Muhammad Aziz Baharsyah, S.Pi	Pengadministrasi Monev dan Pelaporan	Anggota
C.	Tim Kerja Keuangan		
1.	Dra. Hera Rusida, MM	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya	Ketua
2.	Mujib Nikmatuloh, S.E	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	Anggota
3.	Ir. Rusmawati Zainy	Pengelola Barang dan Jasa Muda	Anggota
4.	Ridha Afyanti, A.Md	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
5.	Eli Nurcahyani, S.E	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
6.	Dwi Ayu Purwanti, A.Md	Pengelola Keuangan	Anggota
7.	Muhammad Aris Nurcholih S.E., M.M	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
8.	Suprapti	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
9.	Iwan Saputra	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
10.	Mohamad Yamin	Pengadministrasi BMN	Anggota
11.	Nasrul Rizal Azhar, S.Sos	Pustakawan Pertama / Pengadministrasi BMN	Anggota
12.	Agung Pranajaya	Pengadministrasi BMN	Anggota
13.	Dwi Primawati, S.H	Analisis SDM Aparatur	Anggota
14.	Tristanto Wahyu Nugroho, S.E	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
15.	Wawan Wahyu, A.Md	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
16.	Susanto	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
D.	Tim Kerja SDM Aparatur, Sistem manajemen pengetahuan dan dukungan manajemen lainnya		
1.	Galuh Laksita Swasti, S.Pi	Perencana Muda	Ketua
2.	Junaedi Abdillah, SE, M.AP.	Arsiparis Muda	Anggota
3.	Ir. Rusmawati Zainy	Pengelola Barang dan Jasa Muda	Anggota
4.	Arief Gunawan, S.Kom	Pustakawan Muda	Anggota
5.	Nasrul Rizal Azhar, S.Sos	Pustakawan Pertama	Anggota
6.	Suyatno A.Md.	Pustakawan Penyelia	Anggota
7.	Fristiya Heri Kartika, S.Kom	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Anggota
8.	Retno Sari Widyanti A.M.d.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Anggota
9.	Dwi Primawati, S.H	Analisis SDM Aparatur	Anggota
10.	Api Yuri Andreas Nurrachman, S.E	Analisis SDM Aparatur	Anggota
11.	Suriani, S.E	Analisis SDM Aparatur	Anggota
12.	Norma Tri Utami, A.Md.	Pengelola Program dan Laporan	Anggota
13.	Eka Sekarwati	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota

14.	Marlea Oktaviani	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
15.	Diana Yulianti	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
16.	I Gede Bayu Sedana, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	Anggota
17.	Sandi Wibowo, S.T	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
18.	Muhammad Aris Nurcholis S.E, MM	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
19.	Eri Sulistyowati	Pengadministrasi Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
20.	Mohamad Yamin	Pengadministrasi BMN	Anggota
21.	Agung Pranajaya	Pengadministrasi BMN	Anggota
22.	Haerudin	Pengadministrasi BMN	Anggota
23.	Djumiaty	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
24.	Junaedi	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
25.	Supono	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
26.	Sumanto	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
27.	Warsa	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
28.	Okta Ria Yunita, S.St.Pi	Pengadministrasi BMN	Anggota
29.	Muhammad Bubud Alpadin, S.Kom	Pengadministrasi Data	Anggota
30.	Anggi Purwitasari, S.H., M.H	Pengadministrasi Ortala	Anggota
31.	Fenny Irene Supusepa, S.Sos	Pengadministrasi Layanan Perkantoran	Anggota
32.	Agus Andrianto, S.E	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
33.	Iwan Setiawan	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
34.	Isye Mardha Samalo, S.T	Sekretaris	Anggota
35.	Amalia Setiasari, A.Md	Sekretaris	Anggota
36.	Rohmat Hidayat	Pengemudi	Anggota
37.	Hadi Away	Pengemudi	Anggota



Kepala Pusat Riset Perikanan,

Yayan Hikmayani

Lampiran Revisi Surat Tugas Kepala Pusat Riset Perikanan dengan Nomor : B.1869/BRSDM.3/KP440/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAN www.kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : B.1869/BRSDM.3/KP.440/VIII/2023

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam Surat Tugas ini untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja pada Pusat Riset Perikanan.

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
3. Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Nomor 983/SJ.3/OT.210/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023, hal Penyampaian Hasil Validasi Usulan Tim Kerja Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Memberi Tugas:

Kepada : seluruh pegawai Pusat Riset Perikanan

Untuk : 1. menjadi Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
2. memastikan pencapaian Indikator Kinerja dan pelaksanaan Uraian Fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dengan penuh tanggung jawab; dan
3. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Pusat Riset Perikanan.

Pembiayaan : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Pusat Riset Perikanan, Nomor DIPA-032.01.1.622081/2023, tanggal 30 November 2022.

Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2023
Kepala Pusat Riset Perikanan,



Ditandatangani Secara
Elektronik

Yayan Hikmayani
(NIP.196710041999032001)

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRÉ, BSSN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PUSAT RISET PERIKANAN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
1	Dra. Endang Sriyati 19680104 199503 2 001 Pembina, IV/a Perencana Ahli Madya	Ketua				10
2	Sugesti Titik Maryati S.E. 19800309 201012 2 001 Penata Tk I, III/d Perencana Ahli Muda	Anggota				5
3	Drs. Nurbakti Listyanto 19800309 201012 2 001 Penata Tk I, III/d Perencana Ahli Muda	Anggota				5
4	Hadhi Nugroho, S.T 19800309 201012 2 001 Penata Tk I, III/d Perencana Ahli Muda	Anggota				5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
5	Noor Bimo Adhiyudanto, S.Si. 19800309 201012 2 001 Penata Tk I, III/d Perencana Ahli Muda	Anggota				5
6	Niken Winarsih, S.E 19800309 201012 2 001 Penata Tk I, III/d Perencana Ahli Muda	Anggota				5
7	Muhammad M. Mandailing, S.Pi., M.Si 19731114 200604 1 003 Pembina, IV/a Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota				5
8	Bambang Trias Yulianto, S.Fil., M.Si 19760701 201012 1 001 Pembina, IV/a Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota				5
9	Asmuil, S.Pi 19670710 200303 1 001 Penata Tk I, III/d Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota				5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
10	Susanna Purna Dewi Suharto, A.Md. 19920830 201503 2 003 Penata Muda Tk. I, III/a Pengelola Program dan Laporan	Anggota				5
11	Dra. Hera Rusida, MM 19690810 199601 2 001 Pembina Tk. I, IV/b Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya		Ketua			10
12	Mujib Nikmatuloh, S.E 19830927 201012 1 001 Penata Tk. I, III/d Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda		Anggota			5
13	Ir. Rasmawati Zainy 19660722 199903 2 001 Penata Tk. I, III/d Pengelola Barang dan Jasa Muda		Anggota			5
14	Ridha Afyanti, A.Md 19900915 201503 2 001 Pengatur Tk.I, II/d Pranata Keuangan APBN Terampil		Anggota			5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
15	Eli Nurcahyani, S.E 19781202 200604 2 007 Penata Muda Tk.I, III/b Penyusun Laporan Keuangan		Anggota			5
16	Dwi Ayu Purwanti, A.Md 19910604 201403 2 001 Penata Muda, III/a Pengelola Keuangan		Anggota			5
17	Muhammad Aris Nurcholis S.E., M.M 19770610 201012 1 001 Penata Tk. I, III/d Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran			Anggota		5
18	Suprapti 19720327 199203 2 001 Penata Muda Tk.I, II/b Pengadministrasi Keuangan		Anggota			5
19	Iwan Saputra 19780627 199803 1 001 Penata Muda, III/a Pengadministrasi Keuangan		Anggota			5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNB	
20	Galuh Laksana Swasti, S.Pi 19840225 201012 2 003 Penata Tk.I, III/d Perencana Ahli Muda			Ketua		10
21	Junaedi Abdilah, SE, M.AP. 19770604 200604 1 010 Pembina, IV/a Arsiparis Ahli Muda			Anggota		5
22	Arief Gunawan, S.Kom 19780507 200212 1 005 Penata Tk.I, III/d Pustakawan Ahli Muda			Anggota		5
23	Nasrul Rizal Azhar, S.Sos 19840308 201012 1 002 Penata, III/c Pustakawan Ahli Pertama			Anggota		5
24	Suyatno A.Md. 19830109 200801 1 007 Penata Muda Tk.I, III/b Pustakawan Penyelia			Anggota		5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNB	
25	Fristiya Heri Kartika, S.Kom 19760201 200901 1 004 Penata Muda, III/a Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan			Anggota	Anggota	10
26	Retno Sari Widyanti A.M.d. 19800307 200901 2 005 Penata Muda Tk.I, III/b Arsiparis Pelaksana Lanjutan			Anggota		5
27	Dwi Primawati, S.H 19880731 201012 2 002 Penata Tk.I, III/d Analisis SDM Aparatur		Anggota	Anggota		10
28	Suriani, S.E 19691219 200312 2 002 Penata, III/c Analisis SDM Aparatur			Anggota		5
29	Norma Tri Utami, A.Md. 19910804 201503 2 002 Penata Muda, III/a Pengelola Program dan Laporan			Anggota		5
30	Eka Sekarwati 19710208 199203 2 001 Penata Muda Tk.I, III/b Pengadministrasi Kepegawaian			Anggota		5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
31	Marlea Oktaviani 19791020 200212 2 002 Penata Muda Tk.I, III/b Pengadministrasi Kepegawaian			Anggota		5
32	Diana Yulianti 19750719 200604 2 012 Penata Muda, III/a Pengadministrasi Kepegawaian			Anggota		5
33	I Gede Bayu Sedana, S.Kom 19780226 200604 1 001 Penata, III/c Analisis Data dan Informasi			Anggota	Anggota	10
34	Sandi Wibowo, S.T 19861023 200604 1 002 Penata Muda Tk.I, III/b Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran			Anggota	Anggota	10
35	Eri Sulistyowati 19710224 200003 2 002 Penata Muda Tk.I, III/b Pengadministrasi Bahan Evaluasi dan Pelaporan			Anggota		5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRF, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
36	Mohamad Yamin 19660512 199003 1 004 Penata Muda Tk.I, III/b Pengadministrasi BMN			Anggota		5
37	Agung Pranajaya 19760815 200701 1 003 Pengatur Tk.I, II/d Pengadministrasi BMN		Anggota			5
38	Haerudin 19840627 200910 1 001 Pengatur Tk.I, II/d Pengadministrasi BMN			Anggota		5
39	Djumiati 19680727 199003 2 004 Penata Muda Tk.I, III/b Pengadministrasi Keuangan			Anggota		5
40	Junaedi 19830729 200910 1 001 Pengatur Muda, II/a Pengadministrasi Persuratan			Anggota		5
41	Supono 19651031 199303 1 002 Penata Muda Tk.I, III/b Teknisi Sarana dan Prasarana			Anggota		5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRF, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
42	Sumanto 19670115 199803 1 003 Penata Muda Tk.I, III/b Teknisi Sarana dan Prasarana			Anggota		5
43	Warsa 19670206 199903 1 007 Pengatur Muda, II/a Teknisi Sarana dan Prasarana			Anggota		5
44	Tri Handanari, S.Si, M.Sc 19750531 200212 2 001 Pembina Tk. I, IV/b Perencana Ahli Madya				Ketua	10
45	Ariani Andayani, S.Si, M.Sc 19761208 200212 2 003 Pembina, IV/a Analisis Kebijakan Ahli Madya				Anggota	5
46	Ria Faizah, S.Pi, M.Si 19790307 200212 2 003 Pembina, IV/a Analisis Kebijakan Ahli Madya				Anggota	5
47	Kamaluddin Kasim, S.Pi., M.Sc 19820517 200901 1 005 Penata Tk.I, III/d Analisis Kebijakan Ahli Muda				Anggota	5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
48	Aisyah, ST., M.Si 19791105 200502 2 001 Penata Tk.I, III/d Analisis Kebijakan Ahli Muda				Anggota	5
49	Kusnandi 19720725 200502 1 001 Pengatur Muda Tk. I, II/b Pengadministrasi Program dan Laporan				Anggota	5
50	Dwi Prasetyo, S.Pi. Pegadministrasi Kerja Sama				Anggota	5
51	Citra Sundawa, S.Kom Pengadministrasi Data				Anggota	5
52	Dedy Supriyadi, S.Kom Perencana Ahli Muda				Anggota	5
53	Natasa Kinski, S.Kom Pengadministrasi Anggaran	Anggota				5
54	Dani Candra Rukmana, S.Pi Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota				5
55	Ananda Listya, S.Pi Pengadministrasi Monev dan Pelaporan	Anggota				5
56	Chitra Restu Agustin, S.E Pengadministrasi Monev dan Pelaporan	Anggota				5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
57	Muhammad Aziz Baharsyah, S.Pi Analisis Kebijakan Muda	Anggota				5
58	Trisanto Wahyu Nugroho, S.E Pengadministrasi Keuangan		Anggota			5
59	Wawan Wahyu, A.Md Pengadministrasi Keuangan		Anggota			5
60	Susanto Pengadministrasi Keuangan		Anggota			5
61	Okta Ria Yunita, S.St.Pi Pengadministrasi BMN			Anggota		5
62	Muhammad Bubud Alpadin, S.Kom Pengadministrasi Data			Anggota		5
63	Anggi Purwitasari, S.H., M.H Pengadministrasi Ortala			Anggota		5
64	Fenny Irene Supusepa, S.Sos Pengadministrasi Layanan Perkantoran			Anggota		5
65	Agus Andrianto, S.E Pengadministrasi Persuratan			Anggota		5
66	Iwan Setiawan Pengadministrasi Persuratan			Anggota		5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRF, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
67	Isye Mardha Samalo, S.T Sekretaris			Anggota		5
68	Amalia Setiasari, A.Md Sekretaris			Anggota		5
69	Rohmat Hidayat Pengemudi			Anggota		5
70	Hadi Away Pengemudi			Anggota		5

Kepala Pusat Riset Perikanan,



Ditandatangani Secara Elektronik

Yayan Hikmayani
(NIP.196710041999032001)

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRF, BSSN

Lampiran II Surat Tugas
 Nomor :B.1869/BRSDM.3/KP.440/VIII/2023
 Tanggal :15 Agustus 2023

PEMBAGIAN TUGAS TIM KERJA PUSAT RISET PERIKANAN

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
1	A. Program	1. Nilai PM SAKIP Pusat Riset Perikanan (nilai)	a. Koordinasi dan penyusunan Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja Pusat Riset Perikanan
		2. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)	b. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kinerja Pusat Riset Perikanan
		3. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (nilai)	c. Koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, program, penganggaran, monitoring, evaluasi, pelaporan dan penyiapan bahan pimpinan
2	B. Keuangan	1. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Perikanan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Perikanan 2023	a. Koordinasi dan tindak lanjut penyelesaian terhadap nilai temuan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan
		2. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Pusat Riset Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	b. Koordinasi dan pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan
		3. Nilai IKPA Pusat Riset Perikanan (nilai)	c. Koordinasi kinerja pengelolaan dan pelaksanaan anggaran lingkup Pusat Riset Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRé, BSSN

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
3	C. Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	1. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Perikanan (indeks)	a. Koordinasi, monitoring dan evaluasi capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Perikanan
		2. Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Pusat Riset Perikanan (%)	b. Koordinasi dan monitoring penerapan sistem manajemen pengetahuan pada aplikasi manajemen pengetahuan yang ditunjuk
		3. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya Pusat Riset Perikanan (%)	c. Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengelolaan data, diseminasi dan publikasi, pengelolaan aset dan pengelolaan administrasi SDM Aparatur
4	D. Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	1. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusrisikan (kemitraan)	a. Koordinasi dan pelaksanaan layanan eksternal dalam kemitraan lingkup Pusat Riset Perikanan, termasuk dukungan SFV
		2. Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan	b. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan PNPB Lingkup Pusat Riset Perikanan

Kepala Pusat Riset Perikanan,



Ditandatangani Secara Elektronik

Yayan Hikmayani
 (NIP.196710041999032001)

Catatan

- uraian fungsi diselaraskan dengan indikator kinerja yang sesuai
- untuk uraian fungsi yang tidak ada kesesuaian dengan indikator kinerja, kolom indikator kinerja dikosongkan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRé, BSSN